



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jl. Jendral Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Pangkalan Masyhur, Medan

KATA PENGANTAR

Anggaran yang ditetapkan saat ini disebut dengan anggaran kinerja karena penyusunan dan pelaksanaannya memenuhi prinsip-prinsip prestasi kerja yang dicapai tahun sebelumnya dan rencana masukan, keluaran, hasil, keuntungan dan dampak yang sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Setiap organisasi pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dengan penerapan anggaran kinerja, seluruh pelaksana pembangunan dapat dimotivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Prinsip dasar anggaran kinerja adalah partisipatif, responsive, kesetaraan, visi yang strategis, efektif dan efisien, profesionalisme, akuntabilitas dan pengawasan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan anggaran kinerja sangat tergantung pada itikad baik aparatur Negara, kepercayaan masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah.

Demikian Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara TA. 2022 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan seperlunya.

Medan,

2022

Plt. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA UTARA



Ir. LUSYANTINI, MM
NIP. 19660705.199303.2.004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB-I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB-II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	II-24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	II-27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.....	II-29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-41
BAB-III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-5
BAB-IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	IV-1
4.1. Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.....	IV-1
BAB-V PENUTUP	V-1

BAB - I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas : perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun berkenaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Penyusunan Renja dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penyusunan Renja dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 Tahun dan Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara 5 tahun. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijabarkan berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena merupakan bagian dari RKPD tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Dokumen ini memuat tentang Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan.

Tahapan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

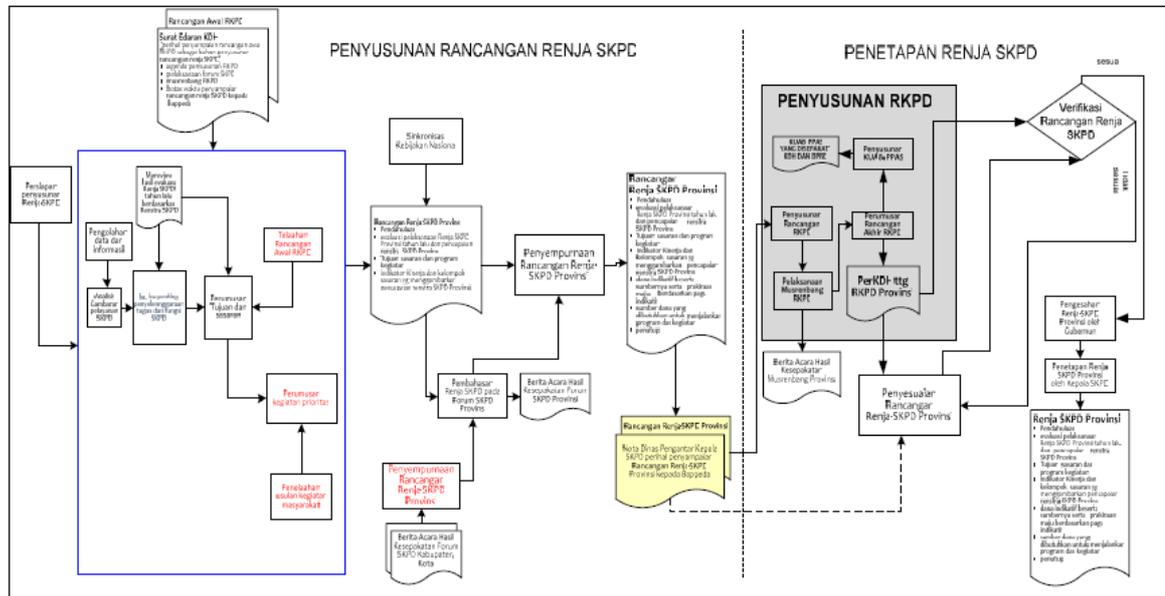
Tahapan persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Perubahan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Penyusunan dan Perumusan rancangan RENJA Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- 6) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- 8) Perumusan kegiatan prioritas;
- 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
- 10) Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- 11) Pembahasan Forum Perangkat Daerah;
- 12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan kementerian terkait

Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi

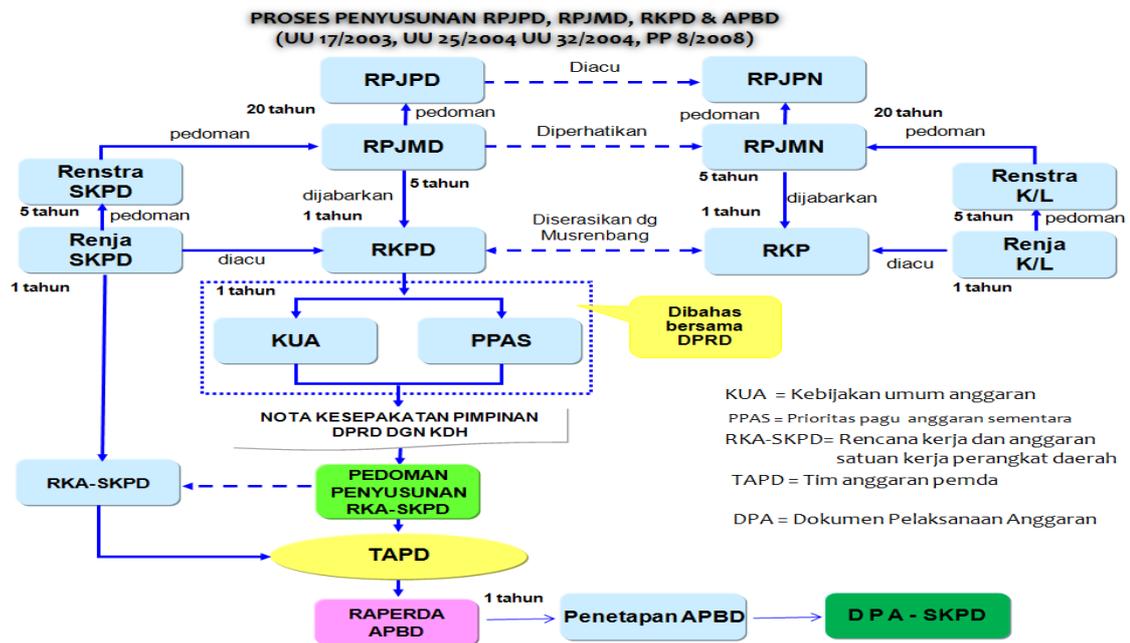
Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RPKD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2019-2024, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2. Proses Penyusunan dan Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya

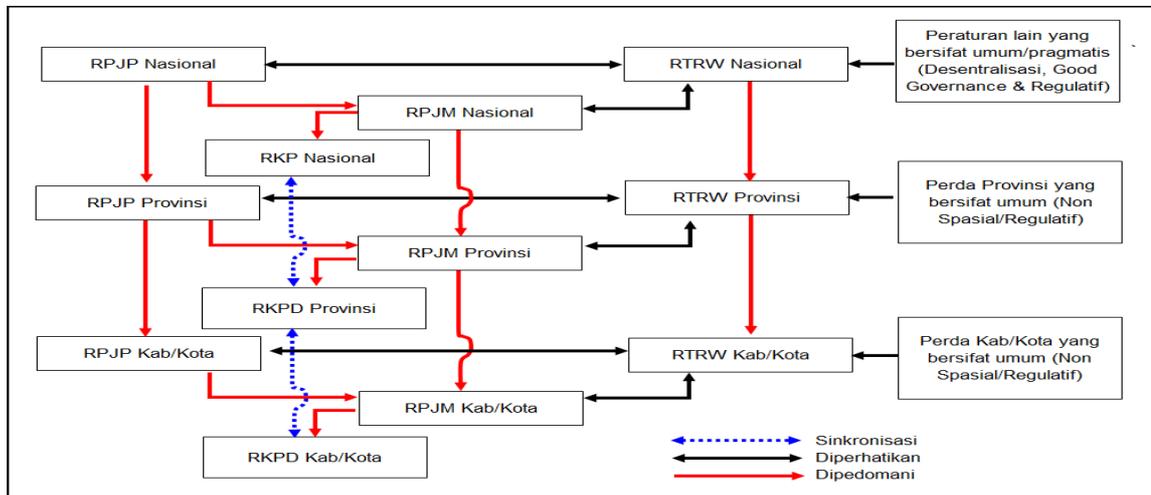
Mengacu pada Gambar. 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R.APBD.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan

penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
2. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah.
4. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RKDP.

Kemudian selanjutnya dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen RKP Nasional dan Renja K/L. Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 1.3.



Gambar 1.3. Bagan keterkaitan RKPD Provinsi dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170)
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023
 19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
 21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Pembangunan Jangka Panjang

- Tahap-IV RPJMD tahun 2019 – 2023.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.
 3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
 4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Susunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang;** Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum;** Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan;** Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan;** Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;** Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah; Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD; Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat; Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah; Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah; Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan; Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB - II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun Lalu (Tahun n-2) Dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun n-1), Mengacu Pada APBD tahun berjalan serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara tahun-tahun sebelumnya.

Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut.

Review capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap RPJMD tahun 2020 (n-2) dan tahun berjalan tahun 2021 (n-1) , dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Usuran Pilihan									
				Pertanian									
				Belanja Langsung									
3.0	3.0	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100	%	100	%	75%		
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran	100%	100	%	100	%	100%	100%	
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran	100%	100	%	100	%	100%	100%	
			03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran	100%	100	%	100	%	100%	100%	
			04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran	100%	100	%	100	%	100%	100%	
			05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran	100%	100	%	100	%	100%	100%	
			06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran	100%	100	%	100	%	100%	100%	
			07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran	100%	100	%	100	%	100%	100%	
			08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran	100%	100	%	100	%	100%	100%	
			09	Penyediaan Biaya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran	100%	100	%	100	%	100%	100%	
			10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran	100%	100	%	100	%	100%	100%	

				11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran		100%	100	%	100	%	100%			100%
				12	Penambahan dan Pemeliharaan Jaringan Wifi	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran		100%	100	%	100	%	100%			100%
				13	Pengelolaan Aset Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	Terlayani Operasionalisasi Administrasi Perkantoran		75%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				14	Operasional UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Bulan Operasional BIH Gedung Johor		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				15	Operasional Kantor UPT. PTPH Provinsi Sumatera Utara	Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				16	Penyediaan Jasa Pendukung UPT. PTPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				17	Operasional UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Bulan Operasional UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				18	Operasional UPT. BI Padi Murni Tanjung Morawa	Jumlah Operasional Kantor yang terlayani		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				19	Operasional UPT. BIH. Kutagadung Berastagi	Jumlah Operasional Kantor Yang terlayani		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				20	Operasional Kantor UPT. PSBTPH	Jumlah Bulan Operasional Kantor UPT. PSBTPH		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				21	Operasional UPT. Mekanisasi Pertanian	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran		100%	1	Tahun	12	Bulan	100%			100%
				22	Operasional UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Mendukung Operasional upt. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				23	Operasional Kegiatan UPT- BI Palawija Tanjung Selamat	Terlaksananya Operasional Kegiatan UPTD-BI Palawija Tanjung Selamat Selama 12 Bulan		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				24	Operasional UPTD Aneka Tanaman Pantai Timur	Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				25	Operasional UPT. BI Aneka Umbi	Meningkatnya Operasional Kantor UPT. BI Aneka Umbi		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				26	Operasional UPT. BI Tanaman Hias dan Biofarmaka	Terlayannya operasional Administrasi Perkantoran UPT. BI Tanaman Hias dan Biofarmaka		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				27	Operasional UPTD. Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Kebutuhan/Keperluan Kantor tersedia		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
3.0 3	3.0 3	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Layanan		100%	100	%	100	%	100%			
				01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		50%	1	Tahun	1	tahun	100%			100%
				02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		50%	50	unit	50	unit	100%			100%

				03	Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	12	Bulan	12	Bulan	100%			100%
				04	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dan Mes Dinas TPH	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	117	Unit	0	%	0%			
				05	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Dinas TPH	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	300	Unit	75	Unit	25%			
				06	Pengadaan Sarana Kebersihan Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1	Tahun	1	Tahun	100%			
				41	Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			9	Unit	9	Unit	100%			
				26	Pembangunan Gedung Kantor di UPT. BIH Arse Sipirok	Jumlah Sarana Bangunan/Gedung Kantor			5	Unit	5	Unit	100%			
					Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung/Gudang Kantor UPT- BI. Palawija Tanjung Selamat	Terlaksananya Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPT- BI. Palawija Tanjung Selamat		100%	3	Paket	1	Paket	33%			
					Pembangunan Gedung Kantor UPT. BI. Palawija Tanjung Selamat	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor UPT. BI. Palawija Tanjung Selamat		100%								100%
					Penyediaan Sarana Pengolahan/Prosesing dan Perlengkapan Kantor UPT BI Palawija Tanjung Selamat			100%								100%
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD. PTPH (Kantor/Laboratorium)	Kenyamanan Kantor Bagi Aparatur		100%								100%
					Pembangunan/Rehabilitasi sedang/berat gedung/Lab/Screen House UPT.BI Tanaman Hias dan Biofarmaka	kenyamanan kantor bagi aparatur		100%								100%
					Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPT. Aneka Umbi Padang Sidempuan	Bertambahnya Fasilitas Gedung Perkantoran		100%								100%
				19	Pembangunan/Renovasi /Rehabilitasi UPT/Balai Benih Induk Hortikultura Kutagadung	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor		100%	3	Unit	3	Unit	100%			100%
				13	Penataan Taman Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Taman yang ditata			1	Unit	1	Unit	100%			100%
				48	Pembangunan/Renovasi/Rehabilitasi UPT.BI.Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Gedung dan Bangunan kantor terpelihara dengan baik		100%	2	Paket	2	Paket	100%			100%
				16	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Screen House UPT. BIH Gedung Johor				1	Unit	1	Unit	100%			100%
					Penyediaan Sarana Pengolahan/Prosesing dan	Tersedianya Alat Mesin Pertanian yang memadai		100%								100%

				22	Rapat Koordinasi Teknis Lingkup Dinas TPH	Mendorong Peningkatan SDM Perencanaan Dinas TPH Provsu		1	Kegiatan	1	Keg	100%			100%
					Penyediaan Jasa Publikasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%								100%
					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Jumlah Laporan Yang Disusun	100%								100%
3.0 3	3.0 3	01	38		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH	Meningkatnya kualitas data Statistik Pertanian		95	%	95	%	100%			100%
				02	Pengumpulan, Pengolahan dan Pengujian Data Statistik Pertanian	Meningkatnya pengumpulan data statistik pertanian (ubinan) dalam rangka peningkatan pencapaian laporan kinerja	100%	1	Komoditi	1	Komoditi	100%			100%
				03	Pengawasan dan Pendampingan Cacah Ubinan dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas produktivitas kabupaten/kota	100%	3	Komoditi	3	Komoditi	100%			100%
				05	Pelatihan dan Publikasi Statistik Pertanian	Meningkatnya kualitas produktivitas kabupaten/kota		6	Buku	6	Buku	100%			100%
				06	Rapat Koordinasi Dinas Pertanian se Sumatera Utara	Meningkatnya kualitas produktivitas kabupaten/kota		1	Kali	1	Kali	100%			100%
				07	Koordinasi dan Penyusunan Data Produksi Pertanian ARAM, ASEM, ATAP	Meningkatnya kualitas produktivitas kabupaten/kota	100%	5	Rapat	5	Rapat	100%			100%
3.0 3	3.0 3	01	38		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	1. Padi (Ton/GKG)		4.232.971	Ton/GKG	4.696.414,00	Ton/GKG	85,41%			
						2. Jagung (Ton Pipilan Kering)		1.875.144	Ton Pipilan Kering	1.960.424,00	Ton Pipilan Kering	104,55%			
						3. Kedelai (Ton)		3.230	Ton	3.764,00	Ton	39,50%			
				01	Pengembangan Budidaya Padi Inbrida	Meningkatnya produksi tanaman padi	100%	5.000	Ha	5.000	Ha	100%			100%
				02	Pengembangan Budidaya Jagung Hibrida	Meningkatnya produksi tanaman jagung	100%	1.145	Ha	1.145	Ha	100%			100%
				35	Pengadaan Benih Sumber bagi Penangkar	Penangkaran benih padi	100%	1.000	Ha	1.000	Ha	100%			100%
				05	Cadangan Benih Daerah	Benih yang Dicadangkan	0%	2.050	Kg	2.050	Kg	100%			100%
				04	Pengembangan Budidaya Kedelai	Meningkatnya produktivitas dan produksi kedelai	0%	50	Ha	50	Ha	100%			100%
				33	Pengembangan Budidaya Kacang Tanah	Meningkatnya produktivitas dan produksi kacang tanah		50	Ha	50	Ha	100%			100%
				34	Pengembangan Budidaya Kacang Hijau	Meningkatnya produktivitas dan produksi kacang hijau		50	Ha	50	Ha	100%			100%
				31	Pengembangan Budidaya Ubi	Meningkatnya produktivitas		30	Ha	30	Ha	429%			

				41	Pengembangan Budidaya Kentang	Peningkatan Produksi Tanaman Kentang			10	Ha	10	Ha	100%			100%
				15	Pengembangan Budidaya Bawang Putih	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Putih			5	Ha	5	Ha	100%			100%
				40	Registrasi Lahan Usaha	Registrasi Lahan Usaha			0	Buah	0	Buah	0%			0%
				02	Pembinaan Desa Mandiri TP PKK Provinsi Sumatera Utara	Pembinaan Desa Mandiri TP PKK Provinsi Sumatera Utara	100%	1200	Batang	1200	Batang	100%				100%
				37	Pengembangan Kawasan Aneka Buah di Provinsi Sumatera Utara	Peningkatan produksi tanaman hortikultura	60%	4	Jenis	4	Jenis	100%				100%
				32	Registrasi Kebun Buah sesuai GAP/SOP	Peningkatan produksi tanaman hortikultura		0	Buah	0	Ha	0%				0%
				05	Pengembangan Penangkar Bawang	Peningkatan produksi tanaman hortikultura	0%	16,5	Ha	4	Ha	44%				100%
				12	Pengembangan dan Perbanyak Benih/Bibit Hortikultura UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Terpenuhinya Kebutuhan Benih/Bibit Hortikultura	100%	3	Jenis	0	0	0%				100%
				13	Pengembangan dan Penanaman Pohon Induk dan BPMT Buah-Buahan di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	Terpenuhinya Kebutuhan Benih/Bibit Hortikultura	100%	297	Batang	0	Batang	0%				100%
				08	Perbanyak benih sayuran di UPT. BIH. Kutagadung	Jumlah Perbanyak Benih Hortikultura	100%	15	Kegiatan	15	Keg	100%				100%
				44	Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Induk Buah-Buahan di UPT. BIH Kutagadung	Jumlah pohon induk bertambah dan terpeliharaan		3	Kegiatan	3	Keg	100%				100%
				49	Perbanyak dan Pengembangan Tanaman Hias dan Biofarmaka di UPT. BI Tanaman Hias Dan Biofarmaka	Mendorong peningkatan produksi Tanaman Hias Dan Biofarmaka Sumatera Utara	100%	6	Jenis	6	Jenis	100%				100%
				48	Sertifikasi, Pelabelan dan Observasi Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura UPT. PSBTPH	Jumlah Buah-buahan yang disertifikasi dan dilabel	100%	125.000	Batang	-	Batang	0%				100%
				11	Analisa Uji Mutu Benih Tanaman Hortikultura UPT. Sertifikasi Benih TPH	Jumlah analisa uji mutu benih tanaman hortikultura	100%	50	Unit	0	Unit	0%				100%
				45	Perbanyak Bibit Sayuran di UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	(Bibit Bawang Merah, Kentang, Nenas, Cabe Merah, Penanaman Pohon Induk)	100%	3,5	ha	3,5	ha	100%				100%
				06	Pengembangan dan Pemeliharaan Benih/Bibit Hortikultura di UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Benih/Bibit Pengembangan dan Pemeliharaan UPT	100%	7	Jenis	7	Jenis	100%				100%
				43	Sosialisasi dan Promosi Perbenihan Hortikultura di UPT. BIH Gedung Johor	Jumlah Pemeliharaan Pohon Induk		3	Kegiatan			0%				100%
					Koordinasi dan Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Hortikultura	Jumlah Kab/Kota yang diinventarisasi penyebaran varietas unggul dan lokal	100%									100%

						2. Persentase Jalan Pertanian Yang Dapat Dilalui			2. Persentase Jalan Pertanian Yang Dapat Dilalui	3,2%	2. Persentase Jalan Pertanian Yang Dapat Dilalui	5%	109,38%			
						3. Persentase ketersediaan alat mesin pertanian			3. Persentase ketersediaan alat mesin pertanian	1,08%	3. Persentase ketersediaan alat mesin pertanian	0,8%	75%			
				15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hortikultura	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			18	Unit			0%			100%
				01	Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Kwartir	Tersedianya Sarana Prasarana Jaringan Irigasi di Kelompok Tani/P3A	100%		58	Unit	0	Unit	0%			100%
				02	Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian	Tersedianya Sarana Prasarana Jalan Pertanian di Kelompok Tani	100%		6800	Meter	0	Meter	0%			100%
				08	Pembangunan Embung Konservasi Air	Tersedianya Penangkap Air (embung)	0%		1	Unit	1	Unit	100%			100%
				03	Pengadaan Sarana Prapanen	Tersedianya sarana prapanen	100%		214	Unit	0	Unit	0%			100%
				04	Pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil	Tersedianya sarana pasca panen dan pengolahan hasil	100%		76	Unit	0	Unit	0%			100%
				05	Pengembangan Rumah Kompos	Tersedianya rumah kompos bagi petani Provinsi Sumatera Utara	100%		12	Unit	0	Unit	0%			100%
				13	Modifikasi Alat dan Mesin Pertanian UPT. Mekanisasi Pertanian	Jumlah Modifikasi Alta dan Mesin Pertanian			1	unit	1	unit	100%			100%
				19	Pengadaan Bangsal Bawang	Jumlah Media Informasi Pelayanan alat mesin pertanian	33%		23	Unit	23	Unit	100%			100%
				24	Pengadaan Cold Storage/Control Atmosfer Storage (CAS)	Jumlah Media Informasi Pelayanan alat mesin pertanian			1	Unit	1	Unit	100%			100%
					Pengujian Mutu Alsintan UPT. Mekanisasi Pertanian	Jumlah Pengujian Mutu Alsintan	100%									
3.03	3.03	01	34		PROGRAM PEMASARAN, PENGOLAHAN HASIL, JAMINAN MUTU DAN SERTIFIKASI	Jumlah Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sertifikat)							70%			
				03	Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Terlaksananya rapat sistem jaminan mutu hasil tanaman pangan	100%		1	Sertifikat		Sertifikat	0%			100%
				04	Pameran Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi Produk Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan di	100%		12	Pameran	0	Pameran	0%			100%

3	27	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Pimpinan Mengikuti Rapat, Pertemuan, Kunjungan ke Daerah dan Pusat	1 Tahun						1 Tahun	1 Tahun	100%
3	27	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi									100%
3	27	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penggandaan, Cetak Dokumen Kepegawaian	1 Tahun						1 Tahun	1 Tahun	100%
3	27	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet	1 Tahun						1 Tahun	1 Tahun	100%
3	27	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan, Tenaga Adminitrasi, Honorarium Pengeloka Kegiatan dll	1 Tahun						1 Tahun	1 Tahun	100%
3	27	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi									100%
3	27	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan BBM, dan Perawatan Kendaraan Dinas,	80 Unit								100%
3	27	01	1,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor, Pagar Depan dan Pos security	3 Unit								100%
3	27	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Taman Kantor, Jaringan Listrik, Service Komputer, AC, Mesin Babat	1 Tahun						1 Tahun	1 Tahun	100%
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan									
						- padi	15,39						14,97		
						- jagung	16,46						13,14		
						- kedelai	26,62						22,2		
						- akabi	9,01						7		
						b. Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura									
						- Bawang merah	9,22						7,96		
						- Cabe merah	2,39						2,38		
						- Sayur-Sayuran	0,46						0,45		
						- Buah-buahan	1,19						1,18		
3	27	02	1,01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian										100%
3	27	02	1,01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian		1 Tahun 2 Kali								100%
3	27	02	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		10 Kali								100%
3	27	02	1,02		Pengawasan Mutu, Penyediaan		9.964 Ha								100%

					dan Peredaran Benih Tanaman	200.000 Ha 440 Ha 200 Ha 300 Ha 25 Ha 50 Ha 89.282 Btg 300 Ha 150 Ha 200 Ha 250 Ha 700 Ha 50 Ha 2 Paket 2 Paket									
3	27	02	1,02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	2 Paket 2 Paket							2 paket	2 paket	100%
3	27	02	1,02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	200 Ha 300 Ha 25 Ha 50 Ha 89.282 Batang 50 Ha									100%
3	27	02	1,02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	9.964 Ha 200.000 Ha 440 Ha 300 Ha 150 Ha 200 Ha 250 Ha 700 Ha									100%
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										
					a. Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi	0,92							0,9		
					b. Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui	3,6							3,4		
					c. Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	1,18							1,14		
3	27	03	1,01		Penataan Prasarana Pertanian	1 Dokumen 165 Unit 6 Unit 51 Unit 29 Unit 126.7 Ton									100%
3	27	03	1,01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen									100%

3	27	07	1,01	01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian ASN		90 Orang										100%	
3	27	07	1,01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta		210 Orang											100%
3	27	07	1,02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		34 Org 800 Org 1 Kali 158 Org 1 Tahun 1 Kali											100%
3	27	07	1,02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		34 Orang 1 Tahun 1 Kali											100%
3	27	07	1,02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		300 Orang 1 Kali 158 Orang											100%
3	27	07	1,03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		7 Kali 72 Unit 5 Kali 1 Tahun											100%
3	27	07	1,03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		7 Kali											100%
3	27	07	1,03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani		1 Tahun											100%
3	27	07	1,03	03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani		5 Kali											100%
3	27	07	1,03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani		72 Unit											100%

Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut.

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berikut adalah kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :

No	Kegiatan	Capaian Realisasi Hasil/Keluaran (%)
1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dan Mes Dinas TPH	0%
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Dinas TPH	25%
3	Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung/Gudang Kantor UPT- BI. Palawija Tanjung Selamat	33%
4	Penyusunan Laporan Tahunan Serta Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian	0%
5	Registrasi Lahan Usaha	0%
6	Registrasi Kebun Buah sesuai GAP/SOP	0%
7	Pengembangan Penangkar Bawang	44%
8	Pengembangan dan Perbanyak Benih/Bibit Hortikultura UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	0%
9	Pengembangan dan Penanaman Pohon Induk dan BPMT Buah-Buahan di UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	0%
10	Sertifikasi, Pelabelan dan Observasi Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura UPT. PSBTPH	0%
11	Analisa Uji Mutu Benih Tanaman Hortikultura UPT. Sertifikasi Benih TPH	0%
12	Sosialisasi dan Promosi Perbenihan Hortikultura di UPT. BIH Gedung Johor	0%
13	Dukungan Kegiatan Pemberdayaan Petani di Kawasan Irigasi IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Project)	0%
14	Kajian Demplot dalam Pendampingan /Pengawalan Penyuluhan	0%
15	Fasilitasi Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan	0%
16	Fasilitasi kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Organisasi petani Sumatera utara	0%
17	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gapoktan	0%
18	Fasilitasi Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Sumatera Utara	0%
19	Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES)	0%
20	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	0%
21	Peningkatan SDM petugas, penangkar UPT. BIH. Kutagadung Berastagi	0%
22	Pelatihan/Bimbingan Teknis Agribisnis Bagi Penyuluh Pertanian	0%
23	Pelatihan/Bimbingan Teknis Agribisnis Bagi Petani/Pengurus Poktan	0%
24	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Evaluasi Pasca Pelatihan	50%
25	Pertemuan Dialog Mantri Tani dan Patani se Sumatera Utara	0%
26	Sosialisasi dan Pengenalan Varietas Unggu Baru Bagi Penangkar Benih Padi	0%
27	Peningkatan SDM Petani/Penangkar di UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	0%

28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hortikultura	0%
29	Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Kwartir	0%
30	Pengembangan Jalan Produksi Pertanian/Jalan Pertanian	0%
31	Pengadaan Sarana Prapanen	0%
32	Pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil	0%
33	Pengembangan Rumah Kompos	0%
34	Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan	0%
35	Pameran Dalam Negeri	0%
36	Pembinaan dan Monitoring Harga Hasil Pertanian	100%
37	Pengadaan Pestisida	0%
38	Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan UPT. PTPH	5%
39	Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura UPT. PTPH	5%
40	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Cabai	0%

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berikut adalah kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Capaian Realisasi Hasil/Keluaran (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	100%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	100%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%
9	Penyediaan Biaya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	100%
10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	100%
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	100%
12	Penambahan dan Pemeliharaan Jaringan Wifi	100%
13	Pengelolaan Aset Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	100%
14	Operasional UPT. BIH Gedung Johor	100%
15	Operasional Kantor UPT. PTPH Provinsi Sumatera Utara	100%
16	Penyediaan Jasa Pendukung UPT. PTPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%
17	Operasional UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	100%
18	Operasional UPT.BI Padi Murni Tanjung Morawa	100%
19	Operasional UPT.BIH.Kutagadung Berastagi	100%
20	Operasional Kantor UPT. PSBTPH	100%
21	Operasional UPT. Mekanisasi Pertanian	100%
22	Operasional UPT. Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok	100%
23	Operasional Kegiatan UPT- BI Palawija Tanjung Selamat	100%
24	Operasional UPTD Aneka Tanaman Pantai Timur	100%
25	Operasional UPT. BI Aneka Umbi	100%
26	Operasional UPT. BI Tanaman Hias dan Biofarmaka	100%
27	Operasional UPTD.Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	100%
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%

29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%
30	Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kantor	100%
31	Pengadaan Sarana Kebersihan Kantor	100%
32	Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100%
33	Pembangunan Gedung Kantor di UPT. BIH Arse Sipirok	100%
34	Pembangunan/Renovasi /Rehabilitasi UPT/Balai Benih Induk Hortikultura Kutagadung	100%
35	Penataan Taman Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	100%
36	Pembangunan/Renovasi/Rehabilitasi UPT.BI.Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	100%
37	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Screen House UPT. BIH Gedung Johor	100%
38	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	100%
39	Pengelolaan Kepegawaian	100%
40	Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana	100%
41	Pengawasan dan Pembinaan Administrasi Barang	100%
42	Pembinaan Administrasi Keuangan	100%
43	Penyusunan Laporan Keuangan	100%
44	Rapat Evaluasi Bulanan (1-12) Monitoring dan Evaluasi (Monev)/Posko	100%
45	Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja SKPD Lingkup Pertanian Provinsi Sumatera Utara	100%
46	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Program/ Kegiatan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	100%
47	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara	100%
48	Rapat Koordinasi Teknis Lingkup Dinas TPH	100%
49	Pengumpulan, Pengolahan dan Pengujian Data Statistik Pertanian	100%
50	Pengawasan dan Pendampingan Cacah Ubinan dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten/Kota	100%
51	Pelatihan dan Publikasi Statistisk Pertanian	100%
52	Rapat Koordinasi Dinas Pertanian se Sumatera Utara	100%
53	Koordinasi dan Penyusunan Data Produksi Pertanian ARAM, ASEM, ATAP	100%
54	Pengembangan Budidaya Padi Inbrida	100%
55	Pengembangan Budidaya Jagung Hibrida	100%
56	Pengadaan Benih Sumber bagi Penangkar	100%
57	Cadangan Benih Daerah	100%
58	Pengembangan Budidaya Kedelai	100%
59	Pengembangan Budidaya Kacang Tanah	100%
60	Pengembangan Budidaya Kacang Hijau	100%
61	Koordinasi dan Operasional Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)	100%
62	Perbanyak Benih Pokok Tanaman Palawija Di UPT-Benih Induk Palawija Tanjung Selamat	100%
63	Perbanyak Benih di UPT Aneka Umbi	100%
64	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan UPT. PSBTPH	100%
65	Pengujian Analisa Mutu Benih Tanaman	100%
66	Perbanyak dan Pengembangan Benih Padi Sawah di UPT. BI Padi Tanjung Morawa	100%
67	Perbanyak Benih Tanaman Pangan di UPT.BI Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	100%
68	Pengembangan Budidaya Cabai	100%
69	Pengembangan Budidaya Bawang Merah	100%

70	Pengembangan Budidaya Kentang	100%
71	Pengembangan Budidaya Bawang Putih	100%
72	Registrasi Lahan Usaha	0%
73	Pembinaan Desa Mandiri TP PKK Provinsi Sumatera Utara	100%
74	Pengembangan Kawasan Aneka Buah di Provinsi Sumatera Utara	100%
75	Registrasi Kebun Buah sesuai GAP/SOP	0%
76	Pengembangan Penangkar Bawang	44%
77	Perbanyak benih sayuran di UPT. BIH. Kutagadung	100%
78	Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Induk Buah-Buahan di UPT.BIH Kutagadung	100%
79	Perbanyak dan Pengembangan Tanaman Hias dan Biofarmaka di UPT.BI Tanaman Hias Dan Biofarmaka	100%
80	Perbanyak Bibit Sayuran di UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	100%
81	Pengembangan dan Pemeliharaan Benih/Bibit Hortikultura di UPT. BIH Gedung Johor	100%
82	Penguatan Tenaga Penyuluhan di lapangan	100%
83	Supervisi, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Ketenagaan Penyuluhan di Lapangan	100%
84	Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian	100%
85	Penyusunan Program Penyuluhan	100%
86	Bimbingan Teknis Petugas dan Petani di BPP	100%
87	Pembangunan Embung Konservasi Air	100%
88	Modifikasi Alat dan Mesin Pertanian UPT. Mekanisasi Pertanian	100%
89	Pengadaan Bangsal Bawang	100%
90	Pengadaan Cold Storage/Control Atmosfer Storage (CAS)	100%
91	Pembinaan dan Monitoring Harga Hasil Pertanian	100%
92	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat capaian program prioritas yang melebihi target kinerja yaitu :

No	Indikator Program	Capaian Kinerja (%)
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	
1	Terpenuhinya kebutuhan benih tanaman pangan	
A	Persentase penyediaan kebutuhan benih pangan	
-	Padi	146,19
-	Jagung	111,83
-	Aneka Kacang dan Umbi	315,85
B	Persentase tersedianya kebutuhan Benih Tanaman Pangan oleh Penangkar	
-	Padi	127,55
-	Kedelai	171,23
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	
	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	

-	Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi	184,71
-	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui	109,38
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	
-	Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani	104,48
-	Persentase Kelompok Tani dengan peningkatan kelasnya	500
4	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN	
-	Luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	312,46

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi atau target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun 2020, pada umumnya faktor-faktor yang menjadi penghambat tercapainya realisasi capaian kinerja pada program/kegiatan adalah :

- a. Adanya pandemi Virus Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara sehingga menyebabkan terhambatnya Proses identifikasi, verifikasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) pada kegiatan-kegiatan yang memberikan bantuan berupa benih/bibit, sarana prasarana produksi pra panen dan pasca panen yang seharusnya berlangsung.
- b. Adanya penghematan/refocussing anggaran pada kegiatan-kegiatan dalam rangka stimulus ekonomi penanganan Covid-19
- c. Belum maksimalnya penyampaian laporan Berita Acara Serah Terima bantuan.

Sedangkan faktor-faktor terpenuhi capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan yang berada pada program pendukung memiliki capaian kinerja sesuai dengan target disebabkan karena merupakan kegiatan operasional dari perangkat daerah
- b. Adanya percepatan kegiatan yang bersifat bantuan langsung kepada petani

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Adanya program/kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi atau melebihi target program/kegiatan terhadap capaian program renstra menyebabkan ada beberapa target program yang tidak terpenuhi dan melebihi target.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor diatas adalah sebagai berikut.

- a. Mensupport Dan mengikuti aturan aturan Gubernur Sumatera Utara agar virus covid-19 segera pulih dan proses CPCL dan seluruh kegiatan dapat beralasan normal kembali.
- b. Mempercepat proses penyiapan berkas-berkas pengadaan dan dokumen pendukung penyaluran bantuan.

Terkait dengan capaian target kinerja dari program prioritas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan dan penurunan produksi pada beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura strategis dibandingkan dengan tahun lalu dan target kinerja sesuai dengan rencana strategis yang diakibatkan oleh :

1. Kenaikan

Terjadinya kenaikan produksi disebabkan oleh bantuan benih dan bibit dari pemerintah kepada petani mengalami kenaikan, sehingga meningkatkan luas tanam terhadap komoditas tersebut. Disamping itu, pendampingan, pembinaan dan pengawalan kepada petani oleh penyuluh lapangan, memberikan dampak terhadap kapasitas petani dalam budidaya di lapangan, sehingga transfer pengetahuan dan inovasi teknologi kepada petani dapat berjalan dengan baik.

Pada beberapa komoditas hortikultura terjadinya kenaikan produksi, selain adanya bantuan benih/bibit, juga disebabkan oleh faktor harga jual yang tinggi sehingga animo petani untuk bertanam meningkat dan melakukan perawatan.

2. Penurunan

Terjadinya penurunan produksi diakibatkan dari berkurangnya bantuan benih dibanding tahun sebelumnya. Faktor utama lain yang mengakibatkan berkurangnya produksi adalah dampak data luas baku lahan sawah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN RI. Dengan berkurangnya luas baku lahan sawah, maka alokasi bantuan benih dan pupuk mengalami penurunan. Hal ini mempengaruhi terhadap luas tanam pada komoditas tersebut, sehingga produksi mengalami penurunan.

Pada beberapa komoditas hortikultura, terjadinya penurunan produksi selain berkurangnya atau tidak adanya bantuan benih/bibit, juga disebabkan oleh faktor musim dan cuaca yang tidak mendukung, terjadinya penurunan harga jual sehingga tidak adanya perawatan dari petani dan animo petani untuk bertanam menjadi berkurang, usia tanaman yang sudah tua dan adanya peremajaan serta adanya serangan hama penyakit tanaman.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/ Kewenangan Provinsi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Tugas Pembantuan.
2. Fungsi Pokok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
 - a. Perumusan kebijakan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkungannya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkungannya tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi kebijakan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkungannya tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembahasan Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel rangkuman berikut ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan												Masih rendahnya capaian produksi disebabkan oleh adanya perubahan jadwal tanam sehingga menyebabkan pergeseran panen, adanya alih fungsi lahan sawah sedangkan pada produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor irigasi, saprodi dan pengendalian hama penyakit
		Produksi Padi (ton GKG)												
		sebelum	5.343.688	5.450.562	5.559.573	5.670.764	5.784.180	4.693.563	4.200.112					
		sesudah			3.906.872	3.985.007	4.064.705			3.926.768	3.801.143	4.064.705		
		Produksi Jagung (ton pipilan kering)												
		sebelum	1.811.605	1.847.837	1.884.794	1.922.490	1.960.939	1.960.424	1.965.444					
		sesudah			1.597.073	1.624.357	1.706.549			1.724.398	1.647.757	1.706.549		
		Produksi Kedele (ton)												
		Sebelum	8.905	9.528	10.195	10.909	11.673	9.627	4.003					
		Sesudah			4.052	4.145	4.244			1.463	5.887	4.244		
		2. Jumlah Produktivitas tanaman Pangan												
		- Padi (Ton/Ha)												
		sebelum	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	4,66	5,10					
		sesudah			5,17	5,24	5,25			5,18	5,13	5,25		
		- Jagung (TonHa)												
		sebelum	6,19	6,20	6,20	6,20	6,20	6,14	6,12					
		sesudah			6,21	6,25	6,38			6,30	6,20	6,38		
		- Kedele (Ton/Ha)												
		sebelum	1,30	1,31	1,31	1,32	1,32	1,73	1,56					
		sesudah			1,58	1,58	1,58			1,71	1,58	1,58		
		3. Jumlah Produksi tanaman hortikultura												Pada bawang merah terjadi peningkatan produksi karena dampak dari bantuan dari pemerintah serta adanya food estate sedangkan pada komoditas
- Bawang Merah (Ton)	16.918	17.341	17.775	18.219	18.675	18.072	29.222	53.962	52.589	18.675				
- Cabe (Ton)	168.822	173.887	179.103	184.476	190.011	154.008	193.862	210.220	204.361	190.011				
- Sayur-Sayuran (Ton)	998.498	1.008.483	1.018.568	1.028.754	1.039.041	1.130.462	1.270.084	1.478.904	1.028.754	1.039.041				
- Buah – Buahhan (Ton)	1.180.230	1.193.213	1.206.338	1.219.608	1.233.024	1.107.154	1.249.380	1.467.466	1.219.608	1.233.024				

No	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
		4. Jumlah Produktivitas tanaman hortikultura											lainnya dipengaruhi oleh faktor harga jual di tingkat petani
		-Bawang Merah (Ton/hektar)	7,89	7,99	8,08	8,18	8,28	8,05	9,55	12,33	8,18	8,28	
		- Cabe (Ton/hektar)	9,91	10,02	10,13	10,24	10,36	9,61	10,48	12,23	10,24	10,36	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Sumatera Utara.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut.

1. Tingginya kerusakan infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi
2. Sarana produksi pertanian belum tersedia secara 6 tepat (jumlah, kualitas, harga, jenis, tempat, dan waktu)
3. Sumber daya manusia petani yang rendah dan didominasi oleh generasi tua
4. Kelembagaan petani masih lemah terutama dalam kemampuan akses terhadap permodalan dan informasi pasar
5. Nilai tukar petani (NTP) pangan dan hortikultura masih belum mencapai 100
6. Mutu dan kualitas produk pertanian relatif masih rendah
7. Terjadinya degradasi terhadap lahan pertanian dan penerapan teknologi belum optimal
8. Rantai Tata Niaga yang masih panjang
9. Pendampingan dan pengawalan petani oleh penyuluh/ petugas lapangan belum optimal
10. Stabilitas harga untuk beberapa komoditas belum terjaga dan kurangnya minat petani untuk mengikuti asuransi usaha tani (asuransi)
11. Belum optimalnya kegiatan hilirisasi produk-produk pertanian sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura merupakan tugas secara umum Perangkat Daerah yang dirumuskan kedalam tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dibutuhkan sinergi antar perangkat daerah lingkup pertanian di provinsi, kabupaten/kota serta Kementerian dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

2. Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap-IV Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni **Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya**, maka dirumuskan Visi Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

VISI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023 :

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat”

Dalam pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara maka ditetapkan 8 prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2019-2023, yaitu :

1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan;
2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan

Sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yaitu Prioritas ke-4 : Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris, yang tertuang dalam

perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, terdapat 4 (empat) komoditas strategis pangan utama yang menjadi fokus pencapaian swasembada pangan yaitu beras, jagung, cabai dan bawang merah sampai dengan akhir RPJMD di tahun 2023. Untuk mendukung target tersebut, Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 5 (lima) komoditas tanaman pangan dan hortikultura strategis yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis yang menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah dan Cabai.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, beberapa kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan umum pembangunan pertanian Sumatera Utara yang dilakukan yaitu :

1. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing
2. Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, teknologi dan penyuluhan
3. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian
4. Kebijakan fokus komoditas strategis
5. Kebijakan pemantapan sistem penyuluhan pertanian
6. Kebijakan sistem perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Kebijakan sistem pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Analisa kajian terhadap rancangan awal RKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan. Kajian ini dimaksudkan untuk menggambarkan skala Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan review ini dimulai dengan merumuskan rencana program dan kegiatan dari masing-masing unit Eselon III yang dilanjutkan dengan menjabarkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara tersebut kedalam Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka akan diajukan dan untuk disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai Rencana Kerja tersebut. Dari Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu

penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Adapun Kajian Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Utara.

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumatera Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				216.124.444.985				216.124.444.985
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				112.745.908.590				112.745.908.590
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas TPH			3.554.206.205	Dinas TPH			3.554.206.205
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas TPH			1.376.977.580	Dinas TPH			1.376.977.580
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas TPH			1.271.854.870	Dinas TPH			1.271.854.870
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas TPH			905.373.755	Dinas TPH			905.373.755
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas TPH			92.975.452.275	Dinas TPH			92.975.452.275
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas TPH			92.951.648.880	Dinas TPH			92.951.648.880
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas TPH			23.803.395	Dinas TPH			23.803.395
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas TPH			529.759.010	Dinas TPH			529.759.010
3.27.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas TPH			529.759.010	Dinas TPH			529.759.010
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas TPH			328.801.825	Dinas TPH			328.801.825
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas TPH			328.801.825	Dinas TPH			328.801.825
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas TPH			1.426.776.005	Dinas TPH			1.426.776.005
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas TPH			75.000.000	Dinas TPH			75.000.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas TPH			448.123.915	Dinas TPH			448.123.915
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas TPH			104.227.200	Dinas TPH			104.227.200
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas TPH			32.945.000	Dinas TPH			32.945.000

3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas TPH			104.500.000	Dinas TPH			104.500.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas TPH			661.979.890	Dinas TPH			661.979.890
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas TPH			12.670.879.410	Dinas TPH			12.670.879.410
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas TPH			8.799.670	Dinas TPH			8.799.670
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas TPH			1.162.079.740	Dinas TPH			1.162.079.740
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas TPH			11.500.000.000	Dinas TPH			11.500.000.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas TPH			1.260.033.860	Dinas TPH			1.260.033.860
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas TPH			680.809.360	Dinas TPH			680.809.360
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas TPH			329.224.500	Dinas TPH			329.224.500
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas TPH			250.000.000	Dinas TPH			250.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				58.911.610.181				58.911.610.181
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sumatera Utara			800.000.000	Sumatera Utara			800.000.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Sumatera Utara			450.000.000	Sumatera Utara			450.000.000
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sumatera Utara			350.000.000	Sumatera Utara			350.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Sumatera Utara			58.111.610.181	Sumatera Utara			58.111.610.181
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Sumatera Utara			533.369.772	Sumatera Utara			533.369.772
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kabupaten/ Kota			32.160.892.809	Kabupaten/ Kota			32.160.892.809
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kabupaten/ Kota			25.417.347.600	Kabupaten/ Kota			25.417.347.600
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				0				0

3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				29.038.520.674				29.038.520.674
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Kabupaten/ Kota			29.038.520.674	Kabupaten/ Kota			29.038.520.674
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kabupaten/ Kota			500.000.000	Kabupaten/ Kota			500.000.000
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kabupaten/ Kota			1.500.000.000	Kabupaten/ Kota			1.500.000.000
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten/ Kota			13.731.512.200	Kabupaten/ Kota			13.731.512.200
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kabupaten/ Kota			7.807.008.474	Kabupaten/ Kota			7.807.008.474
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kabupaten/ Kota			3.000.000.000	Kabupaten/ Kota			3.000.000.000
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Sumatera Utara			2.500.000.000	Sumatera Utara			2.500.000.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				2.555.611.500				2.555.611.500
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Kabupaten/ Kota			2.555.611.500	Kabupaten/ Kota			2.555.611.500
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten/ Kota			1.627.867.200	Kabupaten/ Kota			1.627.867.200
3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten/ Kota			27.745.200	Kabupaten/ Kota			27.745.200
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten/ Kota			299.999.900	Kabupaten/ Kota			299.999.900
3.27.05.1.01.04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kabupaten/ Kota			599.999.200	Kabupaten/ Kota			599.999.200

3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				12.872.794.040				12.872.794.040
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Sumatera Utara			1.080.609.368	Sumatera Utara			1.080.609.368
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Sumatera Utara			330.609.368	Sumatera Utara			330.609.368
3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Sumatera Utara			750.000.000	Sumatera Utara			750.000.000
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Sumatera Utara			7.667.999.552	Sumatera Utara			7.667.999.552
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Sumatera Utara			539.999.580	Sumatera Utara			539.999.580
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Sumatera Utara			7.127.999.972	Sumatera Utara			7.127.999.972
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Sumatera Utara			4.124.185.120	Sumatera Utara			4.124.185.120
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Sumatera Utara			179.991.240	Sumatera Utara			179.991.240
3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Sumatera Utara			155.999.880	Sumatera Utara			155.999.880
3.27.07.1.03.03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Sumatera Utara			988.194.540	Sumatera Utara			988.194.540
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Sumatera Utara			2.799.999.460	Sumatera Utara			2.799.999.460
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.000.000.000				2.000.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.750.000.000				1.750.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			1.750.000.000	UPT			1.750.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			1.750.000.000	UPT			1.750.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				250.000.000				250.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	UPT			250.000.000	UPT			250.000.000
3.27.03.1.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	UPT			250.000.000	UPT			250.000.000

3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				950.000.000			950.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				750.000.000			750.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			750.000.000	UPT		750.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			750.000.000	UPT		750.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				200.000.000			200.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	UPT			200.000.000	UPT		200.000.000
3.27.03.1.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	UPT			200.000.000	UPT		200.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				780.000.000			780.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				330.000.000			330.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			330.000.000	UPT		330.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			330.000.000	UPT		330.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				450.000.000			450.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	UPT			450.000.000	UPT		450.000.000
3.27.01.1.08.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	UPT			450.000.000	UPT		450.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				630.000.000			630.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				630.000.000			630.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			630.000.000	UPT		630.000.000

3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			630.000.000	UPT			630.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.350.000.000				1.350.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				350.000.000				350.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			350.000.000	UPT			350.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			350.000.000	UPT			350.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				800.000.000				800.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	UPT			800.000.000	UPT			800.000.000
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	UPT			800.000.000	UPT			800.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				200.000.000				200.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	UPT			200.000.000	UPT			200.000.000
3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	UPT			200.000.000	UPT			200.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.050.000.000				1.050.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				350.000.000				350.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			350.000.000	UPT			350.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			350.000.000	UPT			350.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				700.000.000				700.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	UPT			700.000.000	UPT			700.000.000

3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	UPT			700.000.000	UPT			700.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				550.000.000				550.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				150.000.000				150.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			150.000.000	UPT			150.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			150.000.000	UPT			150.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				400.000.000				400.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	UPT			400.000.000	UPT			400.000.000
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	UPT			400.000.000	UPT			400.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.190.000.000				2.190.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				390.000.000				390.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			390.000.000	UPT			390.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			390.000.000	UPT			390.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.600.000.000				1.600.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	UPT			1.600.000.000	UPT			1.600.000.000
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	UPT			1.600.000.000	UPT			1.600.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				200.000.000				200.000.000

3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	UPT			200.000.000	UPT			200.000.000
3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	UPT			200.000.000	UPT			200.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.399.759.020				1.399.759.020
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				399.759.020				399.759.020
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			399.759.020	UPT			399.759.020
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			399.759.020	UPT			399.759.020
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.000.000.000				1.000.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	UPT			1.000.000.000	UPT			1.000.000.000
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	UPT			1.000.000.000	UPT			1.000.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				50.000.000				50.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				50.000.000				50.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			50.000.000	UPT			50.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			50.000.000	UPT			50.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.860.000.000				1.860.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				360.000.000				360.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			360.000.000	UPT			360.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			360.000.000	UPT			360.000.000

3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.500.000.000				1.500.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	UPT			1.500.000.000	UPT			1.500.000.000
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	UPT			1.000.000.000	UPT			1.000.000.000
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	UPT			500.000.000	UPT			500.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.350.000.000				1.350.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				350.000.000				350.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			350.000.000	UPT			350.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			360.000.000	UPT			360.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.000.000.000				1.000.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	UPT			1.000.000.000	UPT			1.000.000.000
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	UPT			1.000.000.000	UPT			1.000.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				400.000.000				400.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				200.000.000				200.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT			200.000.000	UPT			200.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT			200.000.000	UPT			200.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				200.000.000				200.000.000

3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	UPT			200.000.000	UPT			200.000.000
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	UPT			200.000.000	UPT			200.000.000
	TOTAL				230.684.204.005				230.684.204.005

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan melalui pendekatan *politik, teknokratik, partisipatif, top down* dan *bottom up*, sehingga di dalamnya tercantum indikator keluaran, hasil dan manfaat dari pembangunan pertanian yang berorientasi perdesaan.

Penetapan strategi dan kebijakan umum serta perumusan program dilaksanakan melalui evaluasi pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berorientasi pedesaan dari masing-masing bidang Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Bidang-bidang yang berada dalam lingkup Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara melakukan penelaahan terhadap situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berorientasi pedesaan pada desa-desa miskin yang berbasis pertanian di Provinsi Sumatera Utara, dengan harapan dapat dipilih beberapa desa sasaran yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Program di atas merupakan program prioritas dalam mencapai swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diperoleh dengan cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai tingkat Kabupaten/Kota hingga Tingkat Provinsi.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat diantaranya berasal dari Pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD tahun 2021. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2022 berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan juga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang telah tercantum dalam Rencana Strategis yaitu Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

Rangkuman hasil telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32.
 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
 (Usulan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD SU)
 Di Terima dan Validasi Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi Kabupaten/ Kecamatan		Volume (Usulan)	Catatan (Rekomendasi SKPD/Status)	
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Mandailing Natal	Panyabungan, Siabu, Huta Bargot, Kotanopan, Panyabungan Utara, Tambangan, Panyabungan Timur, Panyabungan Barat	24	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Simalungun	Gunung Malela, Dolok Silau, Raya, Sidamanik, Tanah Jawa, Jawa Maraja Bah Jambi, Panei, Dolok Panribuan, Hatonduhan, Bosar Maligas	12	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Dairi	Parbuluan, Sumbul, Silima Pungga Pungga	3	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Asahan	Meranti, Setia Janji, Tinggi Raja, Bandar Pulau	10	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Tengah	Seluruh Kecamatan	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Humbang hasundutan	Parlilitan, Sijamapolang, Pakkat, Dolok Sanggul, Lintong Ni Huta	11	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Toba	Laguboti, Parmaksian, Balige, Nassau, Bona Tua Lunasi, Nassau, Silaen	8	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Utara	Tarutung, Sipoholon, Adian Koting, Siatas Barita, Adian Koting	11	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Selatan	Sipirok, Saipar Dolok Hole	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Padang Sidempuan	Padang Sidempuan Tenggara	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Batubara	Air Putih, Medang Deras, Lima Puluh Pesisir	3	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Karo	Tiga Binanga	1	Rekomendasi :	Diteruskan ke Musrenbang

No	Program/Kegiatan	Lokasi		Volume (Usulan)	Catatan (Rekomendasi SKPD/Status)	
		Kabupaten/ Kecamatan				
					Usulan diterima	Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Langkat	Binjai, Sei Lapan	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Labuhan Batu Utara	Seluruh Kecamatan	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Deli Serdang	Tanjung Morawa	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
2	Pembangunan jaringan irigasi Pertanian	Mandailing Natal	Puncak Sorik Marapi, Siabu, Kotanopan, Muara Sipongi, Tambangan, Seluruh Kecamatan	10	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Pematang Siantar	Siantar Utara, Siantar Marimbun	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Utara	Siborong-borong, Tarutung, Adian Koting, Pangaribuan	5	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Toba	Silaen, Parmaksian	3	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Serdang Bedagai	Perbaungan, Tanjung Beringin, Serba Jadi, Beringin, Pantai Cermin, Sipispis	13	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Deli Serdang	Pancur Batu, Galang, Beringin, Pantai Labu	5	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Batubara	Air Putih	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Selatan	Saipar Dolok Hole	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Dairi	Sumbul, Tiga Lingga	4	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Labuhan Batu Selatan	Kualuh Selatan	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Karo	Payung	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Nias Utara	Alasa	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No	Program/Kegiatan	Lokasi		Volume (Usulan)	Catatan (Rekomendasi SKPD/Status)	
		Kabupaten/ Kecamatan				
		Samosir	Sitio-tio, Palipi	3	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Simalungun	Gunung Malela, Dolok Panribuan	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Humbang hasundutan	Pollung	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Nias	Gido	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
3	Bantuan Pupuk	Mandailing Natal	Tambangan, Panyabungan Timur, Lingga Bayu, Bukit Malintang	5	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Labuhan Batu Utara	Kualuh Hulu, NA IX-X, Aek Natas, Aek Kuo, Kualuh Selatan	11	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Pematang Siantar	Martoba, Siantar Marimbun	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Simalungun	Tanah Jawa, Bandar Hulan, Jorlang Hataran, Tapian Dolok, Silimakuta, Bosar Maligas, Dolok Batu Nanggar, Gunung Malela, Jorlang Hataran, Dolok Panribuan, Seluruh Kecamatan	11	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Selatan	Saipar Dolok Hole, Angkola Timur, Marancar, Arse	6	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Medan	Medan Tuntungan, Medan Marelan, Medan Amplas	3	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Binjai	Binjai Utara	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Toba	Balige, Silaen, Sigumpar, Nassau, Seluruh Kecamatan	11	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Serdang Bedagai	Pantai Cermin, Seba Jadi, Pegajahan, Dolok Masihul	4	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Deli Serdang	Beringin, Seba Jadi, Sibiru-biru, Pagar Merbau, Galang, Patumbak, Pantai Labu, Sibolangit, Pancur Batu, Sunggal, Namorambe, Tanjung Morawa	24	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No	Program/Kegiatan	Lokasi		Volume (Usulan)	Catatan (Rekomendasi SKPD/Status)	
		Kabupaten/ Kecamatan				
		Padang Sidempuan	Padang Sidempuan Tenggara, Batu Nadua	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Padang Lawas Utara	Batang Onang	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Dairi	Sidikalang, Tiga Lingga, Gunung Sitember, Sumbul, Tanah Pinem, Parbuluan, Silima Pungga Pungga	11	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Karo	Payung, Lau Baleng, Kabanjahe, Berastagi, Merek	5	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Nias Selatan	Teluk Dalam, Fanamaya	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Utara	Sipoholon, Seluruh Kecamatan, Pangaribuan	3	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Langkat	Sei Bingei	3	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Labuhan Batu	Rantau Selatan	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Labuhan Batu Selatan	Torgamba	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Tengah	Seluruh Kecamatan	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Gunung Sitoli		1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Asahan	Tinggi raja	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Batubara	Sei Balai	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Humbang hasundutan	Pollung, Onan Ganjang	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
4	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Mandailing Natal	Panyabungan, Kotanopan, Muara Sipongi, Tambangan , Panyabungan Utara, Bukit Malintang	13	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Simalungun	Dolok Silau, Raya Kahean, Bandar	21	Rekomendasi :	Diteruskan ke Musrenbang

No	Program/Kegiatan	Lokasi Kabupaten/ Kecamatan		Volume (Usulan)	Catatan (Rekomendasi SKPD/Status)	
			Huluan, Panei, Dolok Panribuan, Huta Bayu Raja, Jorlang Hataran, Tapian Dolok, Silimakuta, Sidamanik, Pematang Sidamanik, Sidamanik		Usulan diterima	Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Dairi	Sumbul, Parbuluan, Sidikalang, Lae Parira, Tiga Lingga, Gunung Sitember, Tanah Pinem	16	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Deli Serdang	Beringin, Percut, Sunggal, Galang, Pantai Labu, Pancur Batu, Lubuk Pakam	18	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Labuhan Batu Selatan	Seluruh Kecamatan	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Medan	Medan Tuntungan, Medan Amplas	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Toba	Sigumpar, Tampahan, Balige, Silaen, Laguboti, Parmaksian, Habinsaran, Nassau, Seluruh Kecamatan	15	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Utara	Siborong-borong, Sipahutar, Pangaribuan, Seluruh Kecamatan, Garoga	17	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Asahan	Rawang Panca Arga, Sei Kepayang, Meranti, Simpang Empat, Kisaran Timur, Pulo Bandring, Sei Kepayang Barat, Meranti	13	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Selatan	Arse, Saipar Dolok Hole	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Serdang Bedagai	Serbajadi, Pegajahan	3	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Padang Sidempuan	Padang Sidempuan Tenggara	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Batubara	Air Putih, Lima Puluh Pesisir, Medang Deras	5	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Langkat	Tanjung Pura, Sei Lapan, Pangkalan	45	Rekomendasi :	Diteruskan ke Musrenbang

No	Program/Kegiatan	Lokasi		Volume (Usulan)	Catatan (Rekomendasi SKPD/Status)	
		Kabupaten/ Kecamatan				
			Susu, Hinai, Secanggang, Besitang, Padang Tualang, Batang Serangan, Tanjung Pura, Binjai, Sei Bingei, Serapit, Stabat		Usulan diterima	Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Labuhan Batu Utara	Marbau, Kualuh Leidong, Kualuh Selatan	5	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Karo	Tiga Binanga, Kabanjahe, Berastagi, Lau Baleng	6	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Nias Utara	Alasa	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Tengah	Seluruh Kecamatan	9	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Humbang hasundutan	Pollung, Bakti Raja	3	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Nias Selatan	Hilimegai	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
5	Bantuan Bibit Tanaman	Simalungun	Raya Kahean, Bandar Huluan	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Mandailing Natal	Muara Sipongi, Bukit Malintang	4	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Utara	Parmonangan, Siborong-borong, Garoga, Tarutung, Sipoholon, Seluruh Kecamatan	7	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Toba	Balige, Bona Tua Lunasi, Silaen, Seluruh Kecamatan	4	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Serdang Bedagai	Pegajahan	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Asahan	Aek Kuasan, Buntu Pane, Air Batu, Teluk Dalam, Simpang Empat, Seluruh Kecamatan, Rawang Pancang Arga, Sei Kepayang, Seluruh Kecamatan	10	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Deli Serdang	Sibiru-biru, Pantai Labu, Sibolangit, Tanjung Morawa, Pancur Batu	5	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No	Program/Kegiatan	Lokasi		Volume (Usulan)	Catatan (Rekomendasi SKPD/Status)	
		Kabupaten/ Kecamatan				
		Tapanuli Selatan	Angkola Timur	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Medan		1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Dairi	Sidikalang, Tiga Lingga, Sumbul, Parbuluan, Silima Pungga Pungga, Tiga Lingga	7	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Karo	Tiga Binanga, Payung	3	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Langkat	Sei Bingei	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Nias Selatan	Fanamaya	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Samosir	Sitio-tio	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Binjai	Binjau Utara	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Labuhan Batu	Rantau Selatan	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Tapanuli Tengah	Seluruh Kecamatan	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Batubara	Lima puluh Pesisir, air Putih	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Gunung Sitoli	Seluruh Kecamatan, Gunung Sitoli Barat	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Humbang hasundutan	Pollung, Bakti Raja	2	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Medan	Medan Perjuangan	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
6	Pengembangan Budidaya Padi	Tapanuli Tengah	Seluruh Kecamatan	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
7	Penyediaan Tenaga THL TBPP	Tapanuli Tengah	Seluruh Kecamatan	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No	Program/Kegiatan	Lokasi		Volume (Usulan)	Catatan (Rekomendasi SKPD/Status)	
		Kabupaten/ Kecamatan				
8]	Pengembangan Budidaya Cabai	Tapanuli Tengah	Seluruh Kecamatan	1	Rekomendasi : Usulan diterima	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Selain itu juga Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat berasal dari Hasil Musrenbang Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura se-Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Rangkuman Hasil Musrenbang Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura se-Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.7 Daftar Usulan Rencana Kegiatan Sumber Dana APBD I
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumatera Utara**

REKAP HASIL MUSRENBANG FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				-
3 27 021	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				
		Pengembangan Budidaya Cabai (Benih Cabai Merah 10 Sachet, Plastik Mulsa 20 Glg, Pupuk Kompos 3.000 Kg)	Asahan, Batubara, Binjai, Dairi, Deli Sedang, Gung Sitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Madina, Nias barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Paluta, Palas, Padang Sidempuan, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tanjung Balai, Tapsel, Taput, Tapteng, Tebing tinggi dan Kab. Toba	883 Ha	Merupakan usulan kegiatan Prioritas dalam rangka peningkatan produksi cabai
		Pengembangan Kawasan Aneka Buah di Provinsi Sumatera Utara (Bibit Pisang 1 Btg, Kompos 1 Kg)	Asahan, Batubara, Deli Serdang, gunung Sitoli, Karo, langkat, madina, Nias Utara, Nias, Padang lawas, Padang Sidempuan, Pakpak bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, tanjung balai, Tapsel, Tapteng, taput, Tebing tinggi	462.300 Bat ang	Merupakan usulan kegiatan Prioritas dalam rangka peningkatan produksi buah- buahan
		Pengembangan Penangkar Tanaman Hortikultura (Benih Sumber Bawang Merah 1.000 Kg, Mulsa Plastik 22 Glg)	Asahan, Batubara, Deli Serdang, karo, Medan, Paluta, Padang Sidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapsel, Taput, Toba	102 Ha	Merupakan usulan kegiatan Prioritas dalam rangka penyediaan kebutuhan benih bawang merah
		Pengembangan	Asahan, batubara, Binjai,	Ha	Merupakan usulan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
		Budidaya Bawang Merah (Benih Bawang Merah 700 Kg, Pupuk Kompos 3.000 Kg)	Dairi, Karo, Labuhan batu, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Madina, Madina, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Paluta, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tanjung Balai, Tapsel, Taput, Tebing Tinggi, Toba	917	kegiatan Prioritas dalam rangka peningkatan produksi bawang merah
		Pengembangan Budidaya Aneka Sayur dan Tanaman Biofarmaka (Benih Kentang 700 Kg, Pupuk Kompos 3.000 Kg)	Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, karo, Madina, Padang Sidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Suimalungun, Tapsel, Taput, Toba	285 Ha	Merupakan usulan kegiatan Prioritas dalam rangka peningkatan produksi sayur-sayuran
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				
		Pengembangan Budidaya Padi (Benih Padi 25 Kg)	Asahan, Batubara, Binjai, Dairi, Deli Sedang, Gung Sitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Medan, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Padang Lawas Utara, Padang lawas, padang sidempuan, pakpak bharat, pematang siantar, samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tanjung balai, Tapsel, Tapteng, Taput, tebing, Toba	54.546 Ha	Merupakan usulan kegiatan Prioritas dalam rangka peningkatan produksi padi
		Pengembangan Budidaya Jagung (Benih Jagung 15 Kg)	Asahan, Batubara, Binjai, Dairi, Deli Sedang, Gung Sitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Medan, Nias barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Paluta, Palas, Padang Sidimpuan, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tanjung Balai, Tapsel, Taput, Tapteng, Tebing tinggi dan Kab. Toba	45.651 Ha	Merupakan usulan kegiatan Prioritas dalam rangka peningkatan produksi jagung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
		Pengembangan Budidaya aneka Kacang (Benih Kacang Tanah 120 Kg)	Batubara, Binjai, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, karo, Labuhan Batu Selatan, langkat, Madina, Nias Utara, Paluta, Palas, Padang Sidempuan, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tebing Tinggi, Toba	2.017 Ha	Merupakan usulan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi aneka kacang
		Pengembangan Budidaya aneka Kacang (Benih Kacang Hijau 25 Kg)	Batubara, Binjai, Gunung Sitoli, Karo, Langkat, Madina, Nias Utara, Paluta, Palas, Padang Sidempuan, Serdang Bedagai, Simalungun	1.332 Ha	Merupakan usulan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi aneka kacang
		Pengadaan benih Sumber Bagi Penangkar (Benih Sumber Padi 500 Kg, Mesin Sealer 1 Unit, Pupuk NPK 1.000 Kg, Plastik Packing 60 Kg Pupuk Kompos 4.000 Kg, Timbangan Digital 1 Unit)	Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Gunung Sitoli, karo, Labuhan Batu Utara, Langkat, Madina, Nias utara, Nias, Paluta, Palas, Padang Sidempuan, Pakpak Bharat, Simalungun, tapteng, Taput, tebing tinggi	86 Uni t	Merupakan usulan kegiatan prioritas dalam rangka penyediaan kebutuhan benih padi
		Pengembangan Budidaya Kedelai (Benih Kedelai 50 Kg, Pupuk NPK 50 Kg, Pestisida 2 Ltr, Rizhobium 250 Gr, POC 2 Ltr)	Asahan, Serdang Bedagai,Simalungun,	550 Ha	Merupakan usulan kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan produksi kedelai
		Pengembangan Budidaya Ubi Kayu (Pupuk Kompos 1.000 Kg)	Nias, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Toba Samosir	1.385 Ha	Merupakan usulan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi aneka umbi
		Pengembangan Budidaya Ubi Jalar (Pupuk Urea 150 Kg, Pupuk TSP 100 Kg, Pupuk KCl 100 Kg)	Nias, Simalungun, tapanuli Selatan	278 Ha	Merupakan usulan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi aneka umbi
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				-
3 27 031	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian				
	Sub Kegiatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				
		Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Asahan, Batubara, Binjai, Dairi, Deli Serdang, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, karo, labuhan batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Madina, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Padang lawas, Pematang Siantar, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapteng, Taput, Tebing Tinggi dan Toba	256 Unit	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa jalan pertanian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				
		Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Kwarter	Asahan, Batubara, Binjai, dairi, Deli Serdang, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, karo. Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Madina, Medan, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, padang Lawas, Pematang Siantar, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, tanjung balai, Tapsel, Tapteng, Taput, Tebing Tinggi, Toba	352 Unit	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian jaringan irigasi
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				
		Pengadaan Cultivator	Asahan, Batubara, Binjai, Dairi, Deli Serdang, Gung Sitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, langkat, Madina, Medan, Nias selatan, Nias Utara, Nias, Paluta, Palas, pakpak Bharat, Pematang Siantar, Samosir, Serdang Bedagai,	Unit	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa alat mesin pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
			Simalungun, Tanjung balai, tapanuli Selatan, Tapteng, taput, Tebing Tinggi, Toba		
		Pengadaan Pupuk NPK	Batubara, Binjai, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Medan, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Paluta, Palas, pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tanjung balai, Tapsel, Tapteng, Taput, Toba	8.574.450 KG	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa pendukung lainnya
		Pengadaan Paddy Combine Harvester	Asahan, Batubara, Binjai, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu Utara, langkat, Madina, Nias Selatan, Nias Utara, Padang lawas, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapsel, Toba	106 Uni t	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa alat mesin pertanian
		Pengadaan Hand Traktor	Asahan, Batubara, Binjai, Dairi, Deli Serdang, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, karo, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Madina, Medan, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Paluta, Palas, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tanjung balai, Tapsel, Tapteng, Taput, Tebing tinggi, Toba	871 Uni t	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa alat mesin pertanian
		Pengadaan Traktor Roda 4	Asahan, batubara, Binjai, Dairi, Deli Serdang, Gunung Sitoli, Karo, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Madina, Nias barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias. Paluta, Padang Lawas, pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapsel, Tapteng, Taput, dan Toba	208 Uni t	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa alat mesin pertanian
		Pengadaan Hand Sprayer Elektrik	Asahan, Batubara, Binjai, Dairi, Deli Serdang, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Madina, Medan, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Paluta, Palas, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Samosir,	6.084 Uni t	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa alat mesin pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan	
			Serdang Bedagai, Simalungun, Tanjung Balai, Tapsel, Tapteng, Taput, Tebing Tinggi, Toba			
		Pengadaan Corn sheller	Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Gunung Sitoli, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Madina, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Padang Lawas, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tanjung balai, Tapsel, Tapteng, Taput, Toba	364	Unit	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa alat mesin pertanian
		Pengadaan Power Tresher	Batubara, Dairi, deli Serdang, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Madina, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Padang Lawas, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tanjung balai, Tapsel, tapteng, Taput, Toba	453	Unit	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa alat mesin pertanian
		Pengadaan Rumah Kompos 1 Paket (Kendaraan Roda 3, APPO, Rumah Kompos)	Asahan, batubara, binjai, Dairi, Deli Serdang, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu Selatan, langkat, Medan, Nias Barat, Nias Selatan, Nias, Paluta, Serdang Bedagai, Simalungun, Tanjung Balai, Tapsel, Taput, toba	156	Paket	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa sarana pendukung lainnya
		Pengadaan Control Atmosfere Storage (Mesin CAS dan Gudang)	Nias Selatan, Simalungun, Samosir	8	Unit	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa sarana pendukung lainnya
		Pengadan Bangsal Bawang	Dairi, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Utara	17	Unit	Merupakan usulan kegiatan dalam peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa sarana pendukung lainnya
		Pengadaan Cold Storage	-	-	Unit	Merupakan usulan kegiatan dalam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
					peningkatan ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa sarana pendukung lainnya
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				-
3 27 052	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				
	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
		Pengadaan Pestisida	Batubara, Binjai, Labuhanbatu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Madina, Medan, Nias Barat, Nias Selatan, Nias, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Samosir, Tanjung Balai, Tapsel, tapteng, toba	36.674 KG	Merupakan usulan kegiatan dalam pengendalian serangan OPT
	Sub Kegiatan penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				
		Cadangan Benih Daerah (benih Padi 25 Kg)	Batubara, Gunung Sitoli, Karo, Nias barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Serdang Bedagai, Simalungun, Toba	22.564 Ha	Merupakan usulan kegiatan dalam pengendalian serangan OPT/DPI
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				-
3 27 071	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian				
	Sub Kegiatan Kerjasama				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian swadaya dan swasta				
		Penyediaan Tenaga THL TBPP 1 Org	batubara, Dairi, Gunung Sitoli, Karo, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Madina, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Paluta, Padang Sidimpuan, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapsel, tapteng, taput, Toba	420 Ora ng	Merupakan usulan kegiatan dalam pengembangan SDM Pertanian
3 27 072	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani				
		Demplot Budidaya Jagung (Benih Jagung 15 Kg, Kapur Dolomit 30 Zak, EM-4 3 liter, Pupuk KCL 75 Kg, Pupuk SP 75 Kg, Pestisida 5 Kg, Pupuk Urea 450 Kg)	Gunung Sitoli, Labuhan Batu Selatan, langkat, Nias Selatan, Nias, padang lawas, Pematang Siantar, Serdang Bedagai, Tapsel, Toba Samosir	1.327 Ha	Merupakan usulan kegiatan dalam pengembangan SDM Pertanian
		Demplot Budidaya Bawang Merah (Benih, Mulsa, Pestisida, Pupuk)	Nias, Padang Lawas, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan	76 Uni t	Merupakan usulan kegiatan dalam pengembangan SDM Pertanian
		Demplot Budidaya Bawang Putih (Benih, Mulsa, Pestisida, Pupuk)	Padang Lawas	9 Uni t	Merupakan usulan kegiatan dalam pengembangan SDM Pertanian
		Demplot Budidaya Cabai (Benih, Mulsa, Pestisida, Pupuk)	Nias, Padang Lawas, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapsel, Toba Samosir	62 Uni t	Merupakan usulan kegiatan dalam pengembangan SDM Pertanian

Catatan : Merupakan Rekap Hasil Kesepakatan Akhir Desk Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan secara virtual

BAB - III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan Pembangunan Daerah disusun selain berdasarkan Strategi Pembangunan Daerah Gubernur Terpilih sesuai visi dan misinya, juga mengacu pada Agenda Pembangunan Nasional (RPJM Nasional) dan Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Perencanaan Daerah Sumatera Utara).

Agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Kementerian Pertanian dalam Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke 2 yaitu mewujudkan struktur ekonomi yang

produktif, mandiri dan berdaya saing yang tertuang dalam melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
 3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian
- Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianyaprasarana dan sarana pertanian,
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

Salah satu strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk untuk mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing adalah dengan "Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian". Sejalan dengan kebijakan pembangunan pertanian tersebut, Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara juga turut berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penetapan tujuan Perangkat Daerah yaitu Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang sesuai dengan Peran dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan agenda prioritas nasional (nawa cita), maka perlu memperhatikan strategi pembangunan nasional yang antara lain meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan. Tiga dimensi pembangunan meliputi: dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.

Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun adalah sebagai berikut.

Tabel Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), melalui pengembangan serta menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata dalam rangka mendorong penciptaan struktur ekonomi yang <u>tanggung</u>	Arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada percepatan pembangunan di Kabupaten/Kota untuk mengatasi ketimpangan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan dengan cara peningkatan produktivitas dan daya saing pembangunan menuju Sumatera Utara yang Bermartabat.	Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan untuk melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan. Yang dilakukan dengan pembangunan sumber daya manusia unggul, peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat sistem kesehatan daerah.	Arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat, yang dilaksanakan dengan cara percepatan pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.	Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada akselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Provinsi Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 pada Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan;
2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan prioritas nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan terlihat bahwa seluruh prioritas pembangunan Sumatera Utara yang termuat ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan Prioritas Nasional yang termuat dalam RPJMD 2020-2024, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP3	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP2	Peningkatan akses dan mutu Pendidikan
		PP4	Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP8	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP3	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan
		PP5	Peningkatan daya saing sektor agraris;
		PP6	Peningkatan daya saing sektor pariwisata
		PP7	Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP3	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP8	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/ Kewenangan Provinsi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Tugas Pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuan yaitu : ***Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura*** dengan sasaran yaitu ***Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura***.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Adapun tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 ialah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan sosial, berkeadilan dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang demokratis, bersih dan jujur, dengan sasaran ditujukan kepada :

- (1) Meningkatkan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya yang membawa masyarakat Sumatera Utara semakin sejahtera,
- (2) Terwujudnya Sumut yang demokratis berlandaskan hukum
- (3) Terwujudnya rasa aman dan damai serta terlindunginya semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat
- (4) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
- (5) Terwujudnya Sumut yang asri dan lestari
- (6) Terwujudnya masyarakat Sumut yang bermoral, beretika, beriman dan berbudaya

Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Mewujudkan rasa aman dan damai bagi masyarakat dan perlindungan terhadap semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat
- 2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermoral, beretika dan berbudaya
- 3) Mewujudkan Sumatera Utara yang demokratis dan berdasarkan hukum
- 4) Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
- 5) Menumbuhkan daya saing Sumatera Utara dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat
- 6) Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari di seluruh wilayah termasuk di pedesaan

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJPD Tahap ke-4 ditujukan kepada *pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.*

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 pada Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan;
2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan

Prioritas 4 : Peningkatan daya saing melalui sektor agraris

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas “**Peningkatan daya saing sektor agraris**” diarahkan kepada sasaran utama yakni :

Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 -2023 terkait dengan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara :

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT				
Misi 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM KEHIDUPAN KARENA MEMILIKI IMAN DAN TAQWA, TERSEDINYA SANDANG PANGAN YANG CUKUP, RUMAH YANG LAYAK, KESEHATAN YANG PRIMA, MATA PENCAHARIAN YANG MENYENANGKAN, SERTA HARGA-HARGA YANG TERJANGKAU;				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	3.1 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	3.1.1 Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha serta pengembangan informasi ketenagakerjaan dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi.	1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (link and match) penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja; 2. Fasilitasi standarisasi UMKM dan UKM menuju digitalisasi pemasaran; 3. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi; 4. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi.
		3.2 Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	3.2.1 Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan Dan Energi Pedesaan 3.2.2 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian	1. Meningkatkan Produksi daging sapi dan domba; 2. Mempertahankan swasembada beras dan jagung; 3. Meningkatnya capaian produksi padi, jagung, cabai merah, bawang putih dan bawang merah 4. Peningkatan produksi

			3.2.3 Peningkatan Akses Hilirisasi Produk Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> perikanan tangkap dan budidaya 5. Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi 6. Pembangunan infrastruktur Pertanian 7. Memberikan Jaminan Penetapan Harga Komoditi Pertanian yang Layak
		3.3 Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	3.3.1 Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata melalui Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan destinasi wisata secara terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya; 3. Dukungan destinasi wisata super prioritas Danau Toba; 4. Digitalisasi promosi pariwisata; 5. Pelestarian budaya daerah.

Sekaitan dengan pencapaian misi tersebut diatas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab terhadap pencapaian Misi 1 : "Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau" dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan :

Tujuan

3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;

Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui Tujuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yaitu Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran

3.2. Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing

Strategi

3.2.1 Peningkatan Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan Dan Energi Pedesaan.

3.2.2 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian

3.2.3 Peningkatan Akses Hilirisasi Produk Pertanian

Arah Kebijakan

1. Mempertahankan swasembada beras dan jagung;
2. Meningkatkan capaian produksi padi, jagung, cabai merah, bawang putih dan bawang merah
3. Pembangunan infrastruktur Pertanian
4. Memberikan Jaminan Penetapan Harga Komoditi Pertanian yang Layak

Sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yaitu Prioritas ke-4 : Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris, yang tertuang dalam perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, terdapat 4 (empat) komoditas strategis pangan utama yang menjadi fokus pencapaian swasembada pangan yaitu beras, jagung, cabai dan bawang merah sampai dengan akhir RPJMD di tahun 2023. Untuk mendukung target tersebut, Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 5 (lima) komoditas tanaman pangan dan hortikultura strategis yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis yang menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah dan Cabai.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, beberapa kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan umum pembangunan pertanian Sumatera Utara yang dilakukan yaitu :

1. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing
2. Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, teknologi dan penyuluhan
3. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian
4. Kebijakan fokus komoditas strategis
5. Kebijakan pemantapan sistem penyuluhan pertanian
6. Kebijakan sistem perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Kebijakan sistem pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura

3.2.1 TUJUAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Provinsi Sumatera Utara, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan pertanian.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuan yaitu : ***Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.***

3.2.2 SASARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan tanaman pangan dan hortikultura yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Sasaran Renstra selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJMD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah tanaman pangan dan hortikultura merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah Sumatera Utara 2019-2023.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan sasaran yaitu ***Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.***

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi, jagung dan kedelai)
2. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (padi, jagung dan kedelai)
3. Jumlah Produksi Hortikultura (bawang merah, cabai, sayur-sayuran dan buah-buahan)
4. Jumlah Produktivitas Hortikultura (bawang merah dan cabai)

Penetapan Indikator Kinerja tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Target	
			2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Jumlah Produksi tanaman Pangan				
		- Padi (Ton GKG)	4.693.563	4.200.112		
		sebelum			5.559.573	5.670.764
		sesudah			3.906.872	3.985.007
		-Jagung (ton pipilan kering)	1.960.424	1.965.444		
		sebelum			1.884.794	1.922.490
		sesudah			1.597.073	1.624.357
- Kedele (ton)	9.627	4.003				

		sebelum			10.195	10.909
		sesudah			4.052	4.145
		2. Jumlah Produktivitas tanaman Pangan				
		- Padi (Ton/Ha)	4,658	5,100		
		sebelum			5,20	5,20
		sesudah			5,16	5,24
		- Jagung (Ton/Ha)	6,136	6,119		
		sebelum			6,19	6,20
		sesudah			6,20	6,25
		- Kedele (Ton/Ha)	1,730	1,564		
		sebelum			1,31	1,32
		sesudah			1,57	1,58
		3. Jumlah Produksi hortikultura				
		- Bawang Merah (Ton)	18.072	29.222	17.775	18.219
		- Cabe (Ton)	154.008	193.862	179.103	184.476
		- Sayur-Sayuran (Ton)	1.130.462	1.270.084	1.018.568	1.028.754
		- Buah – Buahhan (Ton)	1.107.154	1.249.380	1.206.338	1.219.608
		4. Jumlah Produktivitas hortikultura				
		- Bawang Merah (Ton/Ha)	8,045	9,551	8,081	8,18
		- Cabe (Ton/Ha)	9,608	10,483	10,131	10,24

Adapun formula pengukuran indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Lampiran dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Bidang Urusan/ Indikator	Rumus
33.	Produksi sektor Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Ton)
2.5.	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas Areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}}$

BAB - IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1. Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Untuk mewujudkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara "**Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris**" melalui tujuan/sasaran Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara "**Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura**", maka ditetapkan 4 (empat) Program Prioritas yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Utama masing-masing Unit Eselon III Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Rencana Program Prioritas pada Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Penyuluhan Pertanian.

Selain program prioritas tersebut, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, juga terdapat program pendukung yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Adapun indikator kinerja Program Program Prioritas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Dengan sasaran program yaitu "Terpenuhinya kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura" dan indikator sasaran :

- a. Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan
- b. Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Dengan sasaran program yaitu " Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Prasarana Pertanian " dan indikator sasaran :

- a. Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi
 - b. Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui
 - c. Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Dengan sasaran program yaitu " Terkendalinya Luas Serangan OPT/DPI tanaman pangan dan hortikultura " dan indikator sasaran : Luas Pengendalian Serangan OPT/DPI.
4. Program Penyuluhan Pertanian
- Dengan sasaran program yaitu " Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian " dan indikator sasaran :
- a. Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani
 - b. Persentase Kelompok Tani dengan peningkatan kelasnya

Berikut adalah tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022.

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022					
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
							Sesudah perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
1					2	4	8	10	11	12	13 = 12 - 11	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					161.025.512.178	172.241.557.178	11.216.045.000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					98.446.352.825	99.305.027.825	858.675.000
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.058.733.800	3.058.733.800	-
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan dan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pertemuan Forum OPD, Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA	Provinsi Sumatera Utara	4 Dokumen, 2 Pertemuan		680.676.000	680.676.000	-
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Insentif Petugas KSA Petugas Penyuluh Lapang Kab/Kota, Pelaksanaan Ubinan Swakarsa mendukung Provitas padi 8 Ton/Ha, Pelatihan KSA Petugas Penyuluh Lapang, Rapat Koordinasi Penyusunan Sasaran Tanam 2023	Provinsi Sumatera Utara	50 Orang, 100 Titik, 7 Pertemuan		1.581.739.000	1.581.739.000	-
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerja Pejabat Eselon II, III dan IV, Rapat Dinas Lingkup Dinas TPH, Rapat POSKO	Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen 1 Kali 12 Kali		796.318.800	796.318.800	-
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					72.255.910.979	72.255.910.979	-
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sumatera Utara	1 Tahun		72.236.107.979	72.236.107.979	-
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penggunaan Dokumen Laporan Keuangan	Medan	1 Tahun		19.803.000	19.803.000	-
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					423.575.000	423.575.000	-

3	27	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Honorarium Pengurus Barang, Panitia Pengadaan, Sertifikasi Aset	Provinsi Sumatera Utara		423.575.000	423.575.000	-
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				149.636.350	418.311.350	268.675.000
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Peningkatan kompetensi Aparatur pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengelolaan kepegawaian Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	Provinsi Sumatera Utara	1 Tahun 17 Orang	149.636.350	418.311.350	268.675.000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.150.235.200	1.350.235.200	200.000.000
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan bahan Peralatan Penerangan/Kelistrikan	Medan	1 Tahun	27.989.700	27.989.700	-
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan ATK, Peralatan dan Bahan Kebersihan, Penyediaan Peralatan Kantor dan Pengadaan Sound Sytem, Laptop, Printer, UPS, Pengadaan meja dan Kursi Aula	Medan	1 Tahun, 1 Paket, 61 Unit	334.696.000	534.696.000	200.000.000
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat, Jamuan Tamu Dinas TPH	Medan	1 Tahun	104.210.000	104.210.000	-
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak Baliho dan Spanduk	Medan	1 Tahun	30.925.000	30.925.000	-
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Media Cetak Belanja Buku Bacaan Perpustakaan	Medan	1 Tahun, 1 Paket	81.454.500	81.454.500	-
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Pimpinan Mengikuti Rapat, Pertemuan, Kunjungan ke Daerah dan Pusat	Medan	1 Tahun	570.960.000	570.960.000	-
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.490.842.140	18.810.842.140	320.000.000
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penggandaan, Pengiriman Dokumen Kepegawaian	Medan	1 Tahun	8.799.350	8.799.350	-
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon, Internet	Medan	1 Tahun	1.159.770.000	1.159.770.000	-
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas)	Penyediaan Jasa Kebersihan, Kemananan, Tenaga Adminitrasi, Honorarium Pengelola Kegiatan dll	Provinsi Sumatera Utara	1 Tahun	11.464.422.800	11.684.422.800	220.000.000

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.PTPH)	Operasional Kantor UPT. PTPH dan Honorarium Petugas THL TB POPT	Provinsi Sumatera Utara	1 Tahun	1.617.374.690	1.617.374.690	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.SBTPH)	Operasional Kantor UPT. SBTPH	Provinsi Sumatera Utara	1 Tahun	614.509.950	614.509.950	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian)	Operasional Kantor UPT. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	Medan	1 Tahun	601.984.290	601.984.290	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.Mekanisasi Pertanian)	Operasional Kantor UPT. Mekanisasi Pertanian	Medan	1 Tahun	424.540.000	424.540.000	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.BIH Gedung Johor)	Operasional Kantor UPT. BIH Gedung Johor	Medan, Deli serdang	1 Tahun	349.999.652	349.999.652	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.BI. Palawija Tanjung Selamat)	Operasional Kantor UPT. BI. Palawija Tanjung Selamat	Deli Serdang	1 Tahun	339.079.650	339.079.650	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.BI. Tanaman Hias dan Biofarmaka)	Operasional Kantor UPT. BI. Tanaman Hias dan Biofarmaka	Medan	1 Tahun	181.692.960	181.692.960	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.BIH. Kutagadung)	Operasional Kantor UPT. BIH. Kutagadung	Karo, Simalungun	1 Tahun	389.984.160	389.984.160	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.BI. Padi Murni Tanjung Morawa)	Operasional Kantor UPT. Murni Tanjung Morawa	Deli Serdang	1 Tahun	399.758.580	499.758.580	100.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.BI. Aneka Tanaman Pantai Timur)	Operasional Kantor UPT. BI. Aneka Tanaman Pantai Timur	Batubara	1 Tahun	49.999.750	49.999.750	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja)	Operasional Kantor UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Tap. Utara	1 Tahun	338.926.450	338.926.450	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.BIH Arse)	Operasional Kantor UPT. BIH Arse	Tap. Selatan	1 Tahun	349.999.986	349.999.986	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT.BI. Aneka Umbi)	Operasional Kantor UPT. BI. Aneka Umbi	Padang Sidempuan	1 Tahun	199.999.872	199.999.872	-
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.917.419.356	2.987.419.356	70.000.000
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan BBM, dan Perawatan Kendaraan Dinas	Provinsi Sumatera Utara	1Tahun , 80 Unit	1.942.000.000	1.942.000.000	-
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perawatan Gedung Kantor Dinas TPH	Medan	1 Paket	775.534.306	845.534.306	70.000.000
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Taman Kantor Dinas TPH	Medan	1 Tahun	199.885.050	199.885.050	-

3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				30.302.714.504	36.142.714.504	5.840.000.000
					Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					200.000.000	200.000.000
					Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Pembelian Sample Pupuk, Pestisida dan Uji Lab	Provinsi Sumatera Utara	20 Sample dan Uji Lab		200.000.000	200.000.000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				30.302.714.504	35.942.714.504	5.640.000.000
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Uji Analisa Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Provinsi Sumatera Utara	2 Paket 2 Paket	533.369.332	533.369.332	-
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Bantuan Saprodi Budidaya Bawang Merah Bantuan Saprodi Budidaya Cabai Bantuan Saprodi Budidaya Kentang Pengembangan Aneka Buah (Durian, Jeruk, Puisang Pengembangan Penangkar Benih Bawang dan Kentang	Provinsi Sumatera Utara	117 Ha 130 Ha 27 Ha 37500 Batang 22 Ha	12.775.460.095	16.299.460.095	3.524.000.000
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (UPT. BIH Gedung Johor)	Perbanyak Bibit Bawang merah TSS Perbanyak Bibit Tanaman Buah Duku, Durian Perbanyak Planlet Pisang dan Kentang	Medan	2 Sachet 2000 Batang 100 Botol	842.644.293	842.644.293	-
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (UPT. BI. Tan. Hias dan Biofarmaka)	Perbanyak Benih Temulawak, Kunyit Putih, Jahe, Anggrek, Agloopenema, Antrium	Medan	4500 Polybag	295.477.850	295.477.850	-
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (UPT. BIH Kutagadung)	Perbanyak Benih Bawang Merah Perbanyak benih Ercis dan Wortel Perbanyak Benih Kentang Perbanyak Bibit Jeruk Per murnian Varietas Benih Wortel	Karo, Simalungun	2 Ha 2 Ha 2 Ha 5000 Batang	1.299.996.016	1.299.996.016	-
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja)	Perbanyak benih Bawang Merah dan Kentang	Tap. Utara	4 Ha	407.427.000	407.427.000	-
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (UPT. BIH. Arse)	Perbanyak Benih Bawang Merah Perbanyak benih Cabai Perbanyak Bibit jeruk	Tap Selatan	1 Ha 2 Ha 10.000 Btg	599.981.760	599.981.760	-

3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bantuan Benih Jagung Bantuan Benih padi Bantuan Budidaya kedelai Pengembangan Budidaya Kacang Hijau Pengembangan Budidaya Kacang Tanah Pengembangan Budidaya Ubi Jalar Pengembangan Budidaya Ubi Kayu Pengembangan Penangkaran Benih Padi	Provinsi Sumatera Utara	3500 Ha 14600 Ha 300 Ha 50 Ha 75 Ha 50 Ha 130 Ha 425 Ha	11.807.693.000	13.858.693.000	2.051.000.000
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan (UPT. BI. Palawija Tanjung Selamat)	Perbanyak Benih Jagung, Kedelai, Kavang Tanah, Kacang Hijau	Deli Serdang	10 Ha	399.999.800	399.999.800	-
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan (UPT. BI. Padi Murni Tanjung Morawa)	Perbanyak Benih Padi Sawah	Deli Serdang	33 Ha	799.996.000	864.996.000	65.000.000
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan (UPT. BI. Aneka Tanaman Gabe Hutaraja)	Perbanyak Benih Kacang Tanah, Padi Sawah, Padi Gogo	Tap. Utara	10 Ha	340.669.500	340.669.500	-
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan (UPT. BI. Aneka Umbi)	Perbanyak Benih Porang, Ubi Kayu, Ubi Jalar	Padang Sidempuan	10 Ha	199.999.858	199.999.858	-
									-	-	-
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				21.474.736.428	25.517.106.428	4.042.370.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian				21.474.736.428	25.517.106.428	4.042.370.000
3	27	03	1.00	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Monitoring Pupuk dan Pestisida Pengadaan Pupuk An Organik	Provinsi Sumatera Utara	1 Tahun 426.7 Ton	849.999.750	1.699.999.750	850.000.000
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Pelatihan GIS Pembangunan, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Provinsi Sumatera Utara	2 Kali, 3 Unit	1.940.000.000	1.940.000.000	-
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Provinsi Sumatera Utara	3 Unit, 21 Kali	4.335.269.937	4.335.269.937	-
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Provinsi Sumatera Utara	268 Unit	1.370.580.000	2.936.450.000	1.565.870.000
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, Rehabilitasi Screen House UPT. BIH. Kutagadung	Kab. Karo	1 Unit	199.999.475	199.999.475	-
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (UPT. Mekanisasi Pertanian)	Pengujian Mutu dan Modifikasi Alat mesin Pertanian	Medan	4 Unit	242.165.941	242.165.941	-

					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (UPT. BI. Aneka Tanaman Hias dan Biofarmaka)	Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Lingkungan Rehab Kanopi Gedung Kantor	Medan	1 Unit 1 Unit	1.178.964.039	1.178.964.039	-
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan Lantai Jemur	Tapanuli Utara	2 Unit	499.925.000	499.925.000	-
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (UPT. BI. Padi Murni Tanjung Morawa)	Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Saung	Deli Serdang	3 Paket		600.000.000	600.000.000
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (UPT. BIH. Gedung Johor)	Pembangunan Pagar Pembatas	medan	1 Unit		226.500.000	226.500.000
					Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Belanja Electric Generating Set Pembangunan Jalan Jalur Pedestrian Pembangunan Pagar Pembatas Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Pembangunan Screen House Pembuatan Sumur Bor Dalam dan Perlengkapannya Penataan Taman Screen House UPT. BIH Gedung Johor	Medan	1 Paket	10.657.837.732	10.657.837.732	-
					Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Pemeliharaan Sarana Laboratorium UPT. BIH. Kutagadung	Karo	1 Paket	199.994.554	199.994.554	-
					Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian (UPT. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Pemeliharaan Sarana Laboratorium (Screen House) UPT. PTPH	Medan, Deli serdang	4 Paket		800.000.000	800.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				987.580.100	1.462.580.100	475.000.000
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				987.580.100	1.462.580.100	475.000.000
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Provinsi Sumatera Utara	47 Kali	374.111.000	849.111.000	475.000.000
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Perjalanan Dinas Mendukung Kegiatan Penanganan DPI Sumber dana APBN	Provinsi Sumatera Utara	1 Tahun	57.736.000	57.736.000	-

3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengadaan Pestisida	Provinsi Sumatera Utara	950 Liter	199.715.350	199.715.350	-
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengadaan Benih Padi dan Jagung sebagai Cadangan Benih Daerah	Provinsi Sumatera Utara	1000 Ha	356.017.750	356.017.750	-
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				9.814.128.321	9.814.128.321	-
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian				678.399.319	678.399.319	-
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Peningkatan SDM petugas Pertanian (Penyuluh)	Provinsi Sumatera Utara	90 Orang	230.608.695	230.608.695	-
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Peningkatan SDM Petani	Provinsi Sumatera Utara	210 Orang	447.790.624	447.790.624	-
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				7.456.694.000	7.456.694.000	-
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Honorarium Petugas Data Harga Kabupaten/Kota Penyusunan Majalah Lensa Tani Dinas TPH Pertemuan Program Penyuluhan	Provinsi Sumatera Utara	34 Orang, 1 Tahun, 1 Kali	493.169.000	493.169.000	-
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Pelatihan Mentor Program IPDMIP Penilaian Penyuluh, BPP, Kelompok Tani Berprestasi Penyediaan Tenaga Penyuluh THL-TB dan Peningkatan SDM Penyuluh	Provinsi Sumatera Utara	300 Orang 1 Kali 158 Orang	6.963.525.000	6.963.525.000	-
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				1.679.035.002	1.679.035.002	-
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Bimbingan Teknis Petugas dan petani di BPP	BPP Kab/Kota	7 Kali	141.962.150	141.962.150	-
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Fasilitasi Pertemuan Petani dan eksportir dan pendampingan manajemen kelembagaan petani	Provinsi Sumatera Utara	1 Tahun	317.899.700	317.899.700	-
3	27	07	1.03	03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Pertemuan sarasehan KTNA, Rakor Komisi Penyuluhan, Perhptani, Temu Usaha KEP	Provinsi Sumatera Utara	5 Kali	469.173.900	469.173.900	-
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Demplot Padi, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih	Provinsi Sumatera Utara	72 Unit	749.999.252	749.999.252	-

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan nasional, pada Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara mengusulkan program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung prioritas nasional. Berikut adalah dukungan Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Prioritas Nasional.

Tabel 4.1 Dukungan Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Prioritas Nasional.

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sesudah Perubahan	Rencana Tahun 2022	
							Target Capaian Kinerja Sesudah Perubahan	Pagu Indikatif Sesudah Perubahan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Uji Analisa Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Paket 2 Paket	533.369.332
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Bantuan Saprodi Budidaya Bawang Merah Bantuan Saprodi Budidaya Cabai Bantuan Saprodi Budidaya Kentang Pengembangan Aneka Buah (Durian, Jeruk, Puisang) Pengembangan Penangkar Benih Bawang dan Kentang	117 Ha 130 Ha 27 Ha 37500 Batang 22 Ha	16.299.460.095
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bantuan Benih Jagung Bantuan Benih padi Bantuan Budidaya kedelai Pengembangan Budidaya Kacang Hijau Pengembangan Budidaya Kacang Tanah Pengembangan Budidaya Ubi Jalar Pengembangan Budidaya Ubi Kayu Pengembangan Penangkaran Benih Padi	3500 Ha 14600 Ha 300 Ha 50 Ha 75 Ha 50 Ha 130 Ha 425 Ha	13.858.693.000
								-
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			
3	27	03	1.00	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Monitoring Pupuk dan Pestisida Pengadaan Pupuk An Organik	1 Tahun 426.7 Ton	1.699.999.750
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Pelatihan GIS Pembangunan, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	2 Kali, 3 Unit	1.940.000.000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	3 Unit, 21 Kali	4.335.269.937
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	268 Unit	2.936.450.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			

3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	47 Kali	849.111.000
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Perjalanan Dinas Mendukung Kegiatan Penanganan DPI Sumber dana APBN	1 Tahun	57.736.000
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengadaan Pestisida	950 Liter	199.715.350
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengadaan Benih Padi dan Jagung sebagai Cadangan Benih Daerah	1000 Ha	356.017.750
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Peningkatan SDM petugas Pertanian (Penyuluh)	90 Orang	230.608.695
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Peningkatan SDM Petani	210 Orang	447.790.624
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Honorarium Petugas Data Harga Kabupaten/Kota Penyusunan Majalah Lensa Tani Dinas TPH Pertemuan Program Penyuluhan	34 Orang, 1 Tahun, 1 Kali	493.169.000
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Pelatihan Mentor Program IPDMIP Penilaian Penyuluh, BPP, Kelompok Tani Berprestasi Penyediaan Tenaga Penyuluh THL-TB dan Peningkatan SDM Penyuluh	300 Orang 1 Kali 158 Orang	6.963.525.000
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Bimbingan Teknis Petugas dan petani di BPP	7 Kali	141.962.150
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Fasilitasi Pertemuan Petani dan eksportir dan pendampingan manajemen kelembagaan petani	1 Tahun	317.899.700
3	27	07	1.03	03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Pertemuan sarasehan KTNA, Rakor Komisi Penyuluhan, Perhptani, Temu Usaha KEP	5 Kali	469.173.900
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Demplot Padi, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih	72 Unit	749.999.252

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pada Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara mengusulkan program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung prioritas Provinsi dan Kegiatan Strategis Provinsi. Berikut adalah dukungan Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung prioritas Provinsi dan Kegiatan Strategis Provinsi.

Tabel 4.2 Dukungan Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung prioritas Provinsi dan Kegiatan Strategis Provinsi

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sesudah Perubahan	Rencana Tahun 2022	
							Target Capaian Kinerja Sesudah Perubahan	Pagu Indikatif Sesudah Perubahan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Uji Analisa Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Paket 2 Paket	533.369.332
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Bantuan Saprodi Budidaya Bawang Merah Bantuan Saprodi Budidaya Cabai Bantuan Saprodi Budidaya Kentang Pengembangan Aneka Buah (Durian, Jeruk, Puisang) Pengembangan Penangkar Benih Bawang dan Kentang	117 Ha 130 Ha 27 Ha 37500 Batang 22 Ha	16.299.460.095
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bantuan Benih Jagung Bantuan Benih padi Bantuan Budidaya kedelai Pengembangan Budidaya Kacang Hijau Pengembangan Budidaya Kacang Tanah Pengembangan Budidaya Ubi Jalar Pengembangan Budidaya Ubi Kayu Pengembangan Penangkaran Benih Padi	3500 Ha 14600 Ha 300 Ha 50 Ha 75 Ha 50 Ha 130 Ha 425 Ha	13.858.693.000
								-
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			
3	27	03	1.00	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Monitoring Pupuk dan Pestisida Pengadaan Pupuk An Organik	1 Tahun 426.7 Ton	1.699.999.750
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Pelatihan GIS Pembangunan, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	2 Kali, 3 Unit	1.940.000.000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	3 Unit, 21 Kali	4.335.269.937
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	268 Unit	2.936.450.000

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara turut mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD. Berikut adalah dukungan Program, kegiatan dan

subkegiatan yang mendukung Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung/mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD.

Tabel 4.3 Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung/mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sesudah Perubahan	Rencana Tahun 2022	
							Target Capaian Kinerja Sesudah Perubahan	Pagu Indikatif Sesudah Perubahan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Uji Analisa Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Paket 2 Paket	533.369.332
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Bantuan Saprodi Budidaya Bawang Merah Bantuan Saprodi Budidaya Cabai Bantuan Saprodi Budidaya Kentang Pengembangan Aneka Buah (Durian, Jeruk, Puisang) Pengembangan Penangkar Benih Bawang dan Kentang	117 Ha 130 Ha 27 Ha 37500 Batang 22 Ha	16.299.460.095
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bantuan Benih Jagung Bantuan Benih padi Bantuan Budidaya kedelai Pengembangan Budidaya Kacang Hijau Pengembangan Budidaya Kacang Tanah Pengembangan Budidaya Ubi Jalar Pengembangan Budidaya Ubi Kayu Pengembangan Penangkaran Benih Padi	3500 Ha 14600 Ha 300 Ha 50 Ha 75 Ha 50 Ha 130 Ha 425 Ha	13.858.693.000
								-
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			
3	27	03	1.00	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Monitoring Pupuk dan Pestisida Pengadaan Pupuk An Organik	1 Tahun 426.7 Ton	1.699.999.750
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Pelatihan GIS Pembangunan, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	2 Kali, 3 Unit	1.940.000.000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	3 Unit, 21 Kali	4.335.269.937
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	268 Unit	2.936.450.000

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara juga turut mempertimbangkan usulan masyarakat/kabupaten/kota yang dihimpun pada Musrenbang RKPD Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura se Sumatera Utara yang diikuti oleh Dinas lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura se Sumatera Utara. Berikut adalah dukungan Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung/mengakomodir usulan masyarakat/kabupaten/kota hasil Musrenbang RKPD Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura se Sumatera Utara.

Tabel 4.4 Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung/mengakomodir usulan masyarakat/kabupaten/kota hasil Musrenbang RKPD Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura se Sumatera Utara

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sesudah Perubahan	Rencana Tahun 2022	
							Target Capaian Kinerja Sesudah Perubahan	Pagu Indikatif Sesudah Perubahan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Uji Analisa Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Paket 2 Paket	533.369.332
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Bantuan Saprodi Budidaya Bawang Merah Bantuan Saprodi Budidaya Cabai Bantuan Saprodi Budidaya Kentang Pengembangan Aneka Buah (Durian, Jeruk, Puisang) Pengembangan Penangkar Benih Bawang dan Kentang	117 Ha 130 Ha 27 Ha 37500 Batang 22 Ha	16.299.460.095
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bantuan Benih Jagung Bantuan Benih padi Bantuan Budidaya kedelai Pengembangan Budidaya Kacang Hijau Pengembangan Budidaya Kacang Tanah Pengembangan Budidaya Ubi Jalar Pengembangan Budidaya Ubi Kayu Pengembangan Penangkaran Benih Padi	3500 Ha 14600 Ha 300 Ha 50 Ha 75 Ha 50 Ha 130 Ha 425 Ha	13.858.693.000
								-
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			
3	27	03	1.00	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Monitoring Pupuk dan Pestisida Pengadaan Pupuk An Organik	1 Tahun 426.7 Ton	1.699.999.750
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Pelatihan GIS Pembangunan, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	2 Kali, 3 Unit	1.940.000.000

3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	3 Unit, 21 Kali	4.335.269.937
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	268 Unit	2.936.450.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	47 Kali	849.111.000
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Perjalanan Dinas Mendukung Kegiatan Penanganan DPI Sumber dana APBN	1 Tahun	57.736.000
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengadaan Pestisida	950 Liter	199.715.350
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengadaan Benih Padi dan Jagung sebagai Cadangan Benih Daerah	1000 Ha	356.017.750
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Peningkatan SDM petugas Pertanian (Penyuluh)	90 Orang	230.608.695
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Peningkatan SDM Petani	210 Orang	447.790.624

BAB - V

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2023, Prioritas Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan usulan masyarakat/kabupaten/kota dari hasil Musrenbang RKPD Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura se Sumatera Utara yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yaitu Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang memuat rencana dalam kurun waktu satu tahun ini telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah memperhatikan permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi, juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi, misi yang ditetapkan, ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan yang dihimpun berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Provinsi Sumatera Utara TA. 2022. Program dan kegiatan yang dihasilkan melalui Musrenbangtan tersebut dipadukan dan disinkronkan dengan rencana program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Perubahan Renja ini.

Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diupayakan agar terlaksana dengan maksimal berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, adalah adanya dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder, DPRD dan pemerintah kabupaten/kota. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional umumnya dan daerah khususnya. Dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian. Tujuan dan sasaran, dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan semangat dan memohon ridho dan kekuatan dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita wujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka **MENINGKATKAN DAYA SAING UNTUK MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MENUJU SUMATERA UTARA YANG AGRARIS DAN BERMARTABAT.**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara ini disusun sebagai Pedoman Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Program dan Kegiatan TA. 2022. Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Perubahan Renja ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran-saran untuk perbaikan pada berikutnya.

MEDAN,

2022

Plt. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA
UTARA



Ir. LUSYANTINI, MM
NIP. 19660705.199303.2.004